

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2023

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

-  (0734) 7420107
-  pa.muaraenim@gmail.com
-  www.pa-muaraenim.go.id
-  Jalan Mayor Tjik Agus
Kiemas, S.H. No.1

SK KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR 1926/KPA.W6-A5/HM1.1/XI/2023
TANGGAL 27 NOVEMBER 2023

TIM PENYUSUNAN
LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN 2023

Ketua Sebelumnya

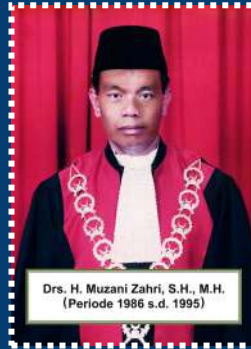
dari Tahun 1962 sampai Sekarang



Oesman Radjawali
(Periode 1962 s.d. 1969)



H. M. Yusuf Abdullah, B.A.
(Periode 1969 s.d. 1986)



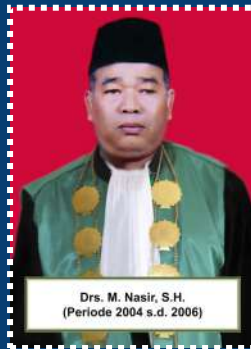
Drs. H. Muzani Zahri, S.H., M.H.
(Periode 1986 s.d. 1995)



Drs. H. M. Syazili Mathir, S.H.
(Periode 1995 s.d. 2002)



Drs. Ismail Fauzi, S.H.
(Periode 2002 s.d. 2004)



Drs. M. Nasir, S.H.
(Periode 2004 s.d. 2006)



Dra. Hj. Nurfala Thoib, S.H., M.H.I.
(Periode 2007 s.d. 2012)



Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
(Periode 2014 s.d. 2016)



Drs. H. Habib Rasyidi Dauly, M.H.
(Periode 2016 sd Mar 2020)



Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.
(Periode Mar 2020 sd Agu 2020)



Drs. Husaini, S.H., M.H.
(Periode Agust 2020 sd Jan 2022)



Suspawati, S.Ag
(Periode Feb 2022 sd sekarang)



VISI & MISI

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

VISI :

MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM YANG AGUNG.

MISI :

- **MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM.**
- **MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI Keadilan.**
- **MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM.**
- **MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM.**



SUSPAWATI, S.Ag

NIP : 197607102001122003
Tempat : Solok
Tanggal Lahir : 10 Juli 1976
Pendidikan : S1
Pangkat : Pembina Tk.I
Gol. Ruang : IV/b
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama
Muara Enim Kelas IB

KETUA

**PENGADILAN AGAMA
MUARA ENIM**

Riwayat Pendidikan

1. SD Inpres Gantung Ciri Kabupaten Solok - Tahun 1989
2. MTs Negeri Balingka Kabupaten Agam - Tahun 19892
3. MA Negeri 2 Bukittinggi - Tahun 1995
4. S-1 Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang - Tahun 1999

Riwayat Jabatan

1. Ketua Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 10/2/2022
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 28/7/2021
3. Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo - TMT 8/3/2019
4. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkaln - TMT 26/10/2018
5. Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian - TMT 22/9/2018
6. Hakim Pengadilan Agama Bangko - TMT 3/12/2012
7. Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo - TMT 14/7/2009
8. Kaur Kepegawaian Pengadilan Agama Muara Labuh - TMT 30/5/2006
9. PNS Pengadilan Agama Muara Labuh - TMT 1/1/2003
10. CPNS Pengadilan Agama Muara Labuh - TMT 1/12/2001

H. MOHAMAD MU'MIN , S.H.I., M.H.

NIP : 197905022007041001
Tempat : Tegal
Tanggal Lahir : 02 Mei 1979
Pendidikan : S2
Pangkat : Pembina
Gol. Ruang : IV/a
Jabatan : Wakil Ketua
Pengadilan Agama Muara Enim

Riwayat Pendidikan

1. SDN Pecabean I - Tahun 1991
2. SMP Penawaja Talang - Tahun 1994
3. SMA Penawaja Tegal Arum - Tahun 1997
4. S-1 STAIN Cirebon - Tahun 2002
5. S-2 Universitas Islam Riau - Tahun 2013

Riwayat Jabatan

1. Hakim Pengadilan Agama Tegal - TMT 28/11/2022
2. Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang - TMT 13/07/2021
3. Wakil Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan - TMT 02/09/2020
4. Hakim Pengadilan Agama Ngamprah - TMT 25/10/2018
5. Hakim Pengadilan Agama Kotabumi - TMT 30/01/2014
6. Hakim Pengadilan Agama Rengat - TMT 29/06/2010
7. PNS Hakim Pengadilan Agama Tegal - TMT 01/08/2008
8. CPNS Calon Hakim Pengadilan Agama Tegal - TMT 01/04/2007

PROFIL HAKIM

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM



SUSPAWATI, S.Ag
Ketua PA. Muara Enim
Hakim Madya Muda
Pembina Tk. 1 (IV/b)



h. MOHAMAD MU'MIN S.H.I., M.H.
Walil Ketua PA. Muara Enim
Hakim Madya Pratama
Pembina (IV/a)



Hj. SABARIAH, S.Ag., S.H.
Hakim PA. Muara Enim
Hakim Madya Utama
Pembina Utama Muda (IV/c)



YENI KURNIATI, S.H.I.
Hakim PA. Muara Enim
Hakim Madya Pratama
Pembina (IV/a)



REZHA NUR ADIKARA, S.H.I.
Hakim PA. Muara Enim
Hakim Pratama Muda
Penata MUda Tk. 1 (III/b)

PROFIL PEJABAT STRUKTURAL

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM



SUSPAWATI, S.Ag
Ketua PA. Muara Enim
Pembina Tk. 1 (IV/b)



H. MOHAMAD MU'MIN, S.H.I., M.H.
Wakil Ketua PA. Muara Enim
Pembina (IV/a)



KARBUDIN, S.Ag
PANITERA
Pembina (IV/a)



HENDRI SURYANA, S.Ag.
SEKRETARIS
Pembina (IV/a)



FIRDAUS, S.H.I.
Panitera Muda Hukum
Penata Tk. 1 (III/d)



LUTHFI HADISAPUTRA, S.H
Panitera Muda Permohonan
Pembina (IV/a)



YENI PUSPITA, S.Ag.
Kasubag Umum dan Keuangan
Penata Tk. 1 (III/d)



RAHMI OKTARIA, S.H.I.
Kasubbag Kepegawaian Ortala
Penata Tk. 1 (III/d)



ENDAH ROSMALA DEWI, S.Si.
Kasubag PTIP
Penata (III/C)

DAFTAR ISI

I Ketua Sebelumnya	
II Visi Misi	
III Profil Ketua	
IV Profil Wakil Ketua	
V Profil Hakim	
VI Profil Pejabat Struktural	
VII Daftar Isi	
VIII Kata Pengantar	
Bab I	
1 Pendahuluan	
Bab II	
5 A. Keadaan Perkara	
5 Keadaan Perkara Tingkat Pertama	
7 Keadaan Perkara Tingkat Banding	
8 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	
10 Keadaan Perkara tingkat Peninjauan Kembali	
12 B. Penyelesaian Perkara	
12 Jumlah sisa perkara yang diputus	
12 Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	
12 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	
14 Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	
14 Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi	
15 C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	
15 Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)	
16 Sidang keliling / pelayanan terpadu	
16 Pelayanan sidang terpadu	
17 Perkara prodeo (Pembebasan biaya perkara)	
Bab III	
19 Sumber Daya Manusia	
20 Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan / golongan / pendidikan	
24 Mutasi	
24 Promosi	
25 Pindah Tugas	
25 Pensiun	
25 Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	
27 Bab IV	
Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	
27 A. Pengelolaan Keuangan	
38 B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	
45 C. Pengelolaan Teknologi Informasi	
45 Implementasi E-Court	
46 Implementasi SIPP	
47 Implementasi Gugatan Mandiri	
49 Bab V	
Peningkatan Pelayanan Publik	
49 Akreditasi Penjaminan Mutu	
55 Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
61 Inovasi Pelayanan Publik	
61 Inovasi Pengadilan Agama Muara Enim	
69 Inovasi Dirjen Badilag	
Bab VI	
103 Pengawasan	
106 A. Internal	
108 B. Evaluasi	
Bab VII	
110 Penutup	
110 A. Kesimpulan	
111 B. Rekomendasi	

KATA PENGANTAR

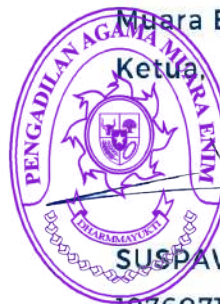
Dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, sebagaimana Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal tersebut, dengan ini Pengadilan Agama Muara Enim telah menyusun Laporan sebagaimana dimaksud.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Muara Enim merupakan media akuntabilitas kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja tersebut kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 yang akan menyusul kemudian

SUSPAWATI, S.Ag
KETUA PA. MUARA ENIM

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Muara Enim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2023 dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan yang dilakukan secara lebih baik dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Muara Enim.

Muara Enim, 4 Januari 2024



Ketua

SUSPAWATI, S.Ag,

197607102001122003



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023



(0734) 7420107



pa.muaraenim@gmail.com



www.pa-muaraenim.go.id



**PENGADILAN AGAMA
MUARA ENIM**

**Jalan Mayor Tjik Agus
Kiemas, S.H. No.1**

Bab I

Pendahuluan

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman yang diterbitkan dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dengan berakhirnya Tahun 2023 ini, maka Pengadilan Agama Muara Enim pun membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini berisi mengenai kegiatan Pengadilan Agama Muara Enim pada Tahun 2023, sebagai penyelenggara pelayanan publik Pengadilan Agama Muara Enim berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dan dalam mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim mengambil kebijaksanaan untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama selaku penyelenggara pemerintahan negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam yaitu :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Waqaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Sadaqoh dan
9. Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama Muara Enim dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Muara Enim membuat Renstra 2020-2024 yang selalu di reviu dengan visi **“Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung”** sedangkan misi Pengadilan Agama Muara Enim, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Muara Enim.

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima Tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan senantiasa menciptakan lingkungan kerja serta kinerja aparatur Peradilan Agama Muara Enim yang profesional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima Tahun kedepan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam mencapai sasaran strategis, 4 (empat) hal tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Muara Enim untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturn Mahkamah Agung.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama.

Dari program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim melayani masyarakat pencari keadilan yang berada pada yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang memiliki wilayah hukum 2 kabupaten yaitu Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bab II

A. Keadaan Perkara

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Alur Perkara Tahun 2023

Alur Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Perdata Gugatan	6	946	952	862	81	9
Perdata Permohonan	0	551	551	530	20	1
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	6	1497	1503	1392	101	10

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023												Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des				
Izin Poligami	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispensasi Kawin	0	33	22	18	0	16	20	27	19	21	16	13	7	212	206	6	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas Kewajiban Suami/ Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	1	40	19	25	5	28	13	21	20	23	13	16	7	231	208	18	5
Cerai Gugat	4	101	70	58	7	104	63	64	64	66	41	43	23	707	641	62	4
Harta Bersama	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	5	4	1	0
Penguasaan Anak	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	3	0	0
Hadhonah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hak-Hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	4	3	1	0	
Penolakan Kawin Campur	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Isbat Nikah	0	0	54	7	3	50	107	4	6	11	62	9	2	323	31 0	12	1
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wali Adhal	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
Kewarisan	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	0	0	
Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Shodaqoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penetapan Ahli Waris / Lain-Lain	0	2	2	0	0	1	0	2	0	2	1	0	0	10	9	1	0
Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	6	185	169	110	16	201	205	119	110	127	133	83	39	1503	13 92	101	10

Pada Tahun 2022 tersisa sebanyak 6 perkara, kemudian pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Enim menerima perkara sebanyak 1497 perkara, jumlah tersebut **menurun 1,25%** dibandingkan Tahun 2022 yang menerima sebanyak 1516 perkara, dengan demikian jumlah perkara Tahun 2023 yang ditangani adalah sebanyak 1503 perkara. Dari 1503 perkara yang ditangani pada Tahun 2023 tersebut, diputus sebanyak 1493 perkara, jumlah tersebut **menurun 2,61%** dibandingkan Tahun 2022 yang memutus sebanyak 1533 perkara, sehingga sisa perkara Tahun 2023 adalah sebanyak 10 perkara lagi, jumlah tersebut sebesar **0,67%** dari jumlah perkara yang ditangani Tahun 2023. Dengan demikian rasio produktivitas penyelesaian perkara adalah sebesar **99,33%**.

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Keadaan perkara tingkat banding pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023

Alur Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Perdata Gugatan	1	5	6	5	0	1
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	1	5	6	5	0	1

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0
Dispensasi Kawin	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas Kewajiban Sumai / Isteri	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	0	1	1	1	0	0
Cerai Gugat	0	3	3	2	0	1
Harta Bersama	0	0	0	0	0	0
Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0
Hadhonah	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-Hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0
Isbat Nikah	0	0	0	0	0	0
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0

Wali Adhal	0	0	0	0	0	0
Kewarisan	1	1	2	2	0	0
Wasiat	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	0	0	0	0	0
Wakaf	0	0	0	0	0	0
Shodaqoh	0	0	0	0	0	0
Penetapan Ahli Waris / Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0
Jumlah	1	5	6	5	0	1

Pada Tahun 2022 tersisa sebanyak 1 perkara banding, kemudian pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Enim menerima perkara banding sebanyak 5 perkara, jumlah tersebut **menurun 16,66%** dibandingkan Tahun 2022 yang menerima sebanyak 6 perkara, sehingga jumlah perkara banding Tahun 2023 yang ditangani adalah sebanyak 6 perkara. Dari 6 perkara banding yang ditangani pada Tahun 2023 tersebut, diputus sebanyak 5 perkara, dan dicabut sebanyak 0 perkara, jumlah tersebut **tetap** dibandingkan Tahun 2022 yang memutus sebanyak 5 perkara, sehingga sisa perkara banding Tahun 2023 adalah sebanyak 1 perkara lagi, jumlah tersebut sebesar **16,66%** dari jumlah perkara banding yang ditangani Tahun 2023. Dengan demikian rasio produktivitas penyelesaian perkara banding adalah sebesar **83,34%**.

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Keadaan perkara tingkat kasasi pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023

Alur Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Perdata Gugatan	0	1	1	0	0	1
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	1	1	0	0	1

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0
Dispensasi Kawin	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas Kewajiban Sumai / Isteri	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	0	0	0	0	0	0
Cerai Gugat	0	1	1	0	0	1
Harta Bersama	0	0	0	0	0	0
Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0
Hadhonah	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-Hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0
Isbat Nikah	0	0	0	0	0	0
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0
Wali Adhal	0	0	0	0	0	0
Kewarisan	0	0	0	0	0	0
Wasiat	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	0	0	0	0	0
Wakaf	0	0	0	0	0	0
Shodaqoh	0	0	0	0	0	0
Penetapan Ahli Waris / Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	1	1	0	0	1

Pada Tahun 2022 tersisa sebanyak 0 perkara kasasi, kemudian pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Enim menerima perkara kasasi

sebanyak 1 perkara, jumlah tersebut **naik 100%** dibandingkan Tahun 2022 yang menerima sebanyak 0 perkara, sehingga jumlah perkara kasasi Tahun 2023 yang ditangani adalah sebanyak 1 perkara. Dari 1 perkara kasasi yang ditangani pada Tahun 2023 tersebut, diputus sebanyak 0 perkara, jumlah tersebut **tetap** dibandingkan Tahun 2022 yang memutus sebanyak 0 perkara, sehingga sisa perkara kasasi Tahun 2023 adalah sebanyak 1 perkara, jumlah tersebut sebesar **100%** dari jumlah perkara kasasi yang ditangani Tahun 2023. Dengan demikian rasio produktivitas penyelesaian perkara kasasi adalah sebesar **0%**.

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Keadaan perkara tingkat peninjauan kembali pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023

Alur Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Perdata Gugatan	0	0	0	0	0	0
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0
Dispensasi Kawin	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas Kewajiban Sumai / Isteri	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	0	0	0	0	0	0
Cerai Gugat	0	0	0	0	0	0
Harta Bersama	0	0	0	0	0	0

Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0
Hadhonah	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-Hak Bekas Istri	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0
Isbat Nikah	0	0	0	0	0	0
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0
Wali Adhal	0	0	0	0	0	0
Kewarisan	0	0	0	0	0	0
Wasiat	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	0	0	0	0	0
Wakaf	0	0	0	0	0	0
Shodaqoh	0	0	0	0	0	0
Penetapan Ahli Waris / Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Pada Tahun 2022 tersisa sebanyak 0 perkara peninjauan kembali, kemudian pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Enim menerima perkara peninjauan kembali sebanyak 0 perkara, jumlah tersebut **tetap** dibandingkan Tahun 2022 yang menerima sebanyak 0 perkara, sehingga jumlah perkara peninjauan kembali Tahun 2023 yang ditangani adalah sebanyak 0 perkara. Dari 0 perkara peninjauan kembali yang ditangani pada Tahun 2021 tersebut, putus sebanyak 0 perkara, jumlah tersebut **tetap** dibandingkan Tahun 2022 yang memutus sebanyak 0 perkara, sehingga sisa perkara peninjauan kembali Tahun 2023 adalah sebanyak 0 perkara, jumlah tersebut sebesar **0%** dari jumlah perkara peninjauan kembali yang ditangani Tahun 2023. Dengan demikian rasio produktivitas penyelesaian perkara peninjauan kembali adalah sebesar **0%**.

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Keadaan sisa perkara Tahun 2023 yang diputus pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Sisa Perkara Tahun 2023 yang diputus pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Alur Perkara Tahun 2023

Alur Perkara	Sisa Perkara 2022	Di Putus 2023	Sisa Perkara 2023 Belum Putus
Perdata Gugatan	6	943	9
Perdata Permohonan	0	550	1
Gugatan Sederhana	0	0	0
Jumlah	6	1493	10

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Keadaan perkara tingkat pertama yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023

Jenis Perkara	Waktu Penyelesaian Perkara (dalam bulan)			Jumlah	Belum Putus
	1 sd 3	3 sd 5	> 5		
Perdata Gugatan	901	42	0	943	9
Perdata permohonan	550	0	0	550	1
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
Jumlah	1451	42	0	1493	10

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Keadaan perkara tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Berdasarkan Alur Perkara Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023

Alur Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus	Mengajukan Banding	Tidak Mengajukan Banding
Perdata Gugatan	6	946	952	943	5	938
Perdata Permohonan	0	551	551	550	0	550
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	6	1497	1503	1493	5	1488

Keadaan perkara tingkat banding yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Banding yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023

Alur Perkara	Sisa Perkara Banding Th. 2022	Perkara Banding Th. 2023	Perkara Banding Ditangani	Di Putus Banding	Belum Putus Banding	Mengajukan Kasasi	Tidak Mengajukan Kasasi
Perdata Gugatan	1	5	6	5	1	1	5
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	1	5	6	5	1	1	5

Keadaan perkara tingkat kasasi yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023

Alur Perkara	Sisa Perkara Kasasi Th. 2022	Perkara Kasasi Th. 2023	Perkara Kasasi Ditangani	Di Putus Kasasi	Belum Putus Kasasi	Mengajukan Peninjauan Kembali	Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali
Perdata Gugatan	0	1	1	0	1	0	0
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	1	1	0	1	0	0

Catatan :

*) Pada Tahun 2023 ada 1 perkara kasasi yang terdaftar dan 1 perkara kasasi tersisa pada Tahun 2023, sehingga jumlah perkara kasasi yang ditangani pada Tahun 2023 sebanyak 1 perkara. Dari 1 perkara kasasi tersebut pada Tahun 2023 telah putus

sebanyak 0 perkara, maka tidak ada perkara kasasi yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

Penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Agama Muara Enim melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel Data Penyelesaian Perkara melalui Mediasi pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Gugatan 2023	Jumlah Perkara Gugatan Yang Di Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi						
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Berhasil Sebagian	AKTA PERDAMAIAN/PUTUSAN	PENETAPAN PENCABUTAN	MEDIASI BERJALAN
Perdata Gugatan	946	174	40	87	4	21	3	16	3
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	946	174	40	87	4	21	3	16	3

5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Penyelesaian perkara pidana anak pada Pengadilan Agama Muara Enim melalui diversi sebagaimana tabel berikut :

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui Diversi pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan Diversi		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. Posbakum (Satker yang Mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran)

Untuk jasa konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum), Pengadilan Agama Muara Enim mendapat alokasi anggaran dalam DIPA Tahun anggaran 2023, alokasi anggaran tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Anggaran tersebut diberikan negara untuk jasa konsultasi layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Muara Enim dengan volume 500 jam layanan pada Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, anggaran sebesar Rp Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah terealisasi secara keseluruhan (**sebesar 100%**), dimana anggaran tersebut dapat memberikan jasa konsultasi layanan bantuan hukum sebanyak 500 jam layanan selama satu Tahun dengan jumlah sebanyak 624 perkara.

Dari anggaran tersebut, Realisasi Volume Keluaran (RVK) telah sesuai dengan Target Volume Keluaran (TVK) yang ditetapkan sebanyak 500 jam layanan, dimana capaian keluaran yang diperoleh pada Tahun 2023 adalah sebesar **124,8%**, yang didapatkan dari rumus (624 jam layanan : 500 jam layanan x 100%).

Tabel Rekapitulasi Jasa Konsultasi layanan Bantuan Hukum Tahun 2023

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Progres (%)
Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	50.000.000	50.000.000	100%	500	624	124,8%

2. Sidang Keliling dan Pelayanan Terpadu

a. Sidang Keliling

Untuk Sidang Keliling (sidang diluar gedung pengadilan), Pengadilan Agama Muara Enim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dalam DIPA Tahun anggaran 2023. Anggaran tersebut diberikan negara untuk penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan dengan volume 96 perkara.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, anggaran sebesar Rp 50.300.000,- (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) telah terealisasi secara keseluruhan (**sebesar 99,99%**), dimana anggaran tersebut dapat menyelesaikan sebanyak 104 perkara sidang keliling, dimana anggaran yang ditetapkan adalah untuk menyelesaikan sebanyak 96 Perkara.

Dengan demikian, Realisasi Volume Keluaran (RVK) telah mencapai Target Volume Keluaran (TVK) yang ditetapkan sebanyak 96 Perkara, dimana capain keluaran yang diperoleh pada Tahun 2023 adalah sebesar **108%**, yang didapatkan dari rumus (104 perkara : 96 Perkara x 100%).

Tabel Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Sidang Keliling Tahun 2023

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Progres (%)
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung	50.400.000	50.300.000	100%	96	104	108%

b. Pelayanan Sidang Terpadu

Untuk Sidang Terpadu (pelayanan sidang terpadu), Pengadilan Agama Muara Enim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam DIPA Tahun anggaran 2023. Anggaran tersebut diberikan negara untuk penyelesaian perkara sidang terpadu dengan volume 100 perkara.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, anggaran sebesar Rp 24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah terealisasi **sebesar 99,4%**, dimana anggaran tersebut dapat menyelesaikan sebanyak 101 perkara sidang terpadu, meskipun anggaran yang ditetapkan untuk menyelesaikan sebanyak 100 Perkara.

Dengan demikian, Realisasi Volume Keluaran (RVK) kurang mencapai Target Volume Keluaran (TVK) yang ditetapkan sebanyak 100 Perkara, dimana capain keluaran yang diperoleh pada Tahun 2023 adalah sebesar **101%**, yang didapatkan dari rumus (101 perkara : 100 Perkara x 100%).

Tabel Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Sidang Terpadu Tahun 2023

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Progres (%)
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	25.000.000	24.850.000	251%	100	251	251%

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Untuk Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara), Pengadilan Agama Muara Enim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 16.920.000,- (enam Belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dalam DIPA Tahun anggaran 2023. Anggaran tersebut diberikan negara untuk bantuan pembebasan biaya perkara dengan volume 20 perkara.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, anggaran sebesar Rp 16.920.000,- (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 16.918.000,- (enam belas juta Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) yaitu **sebesar 99,98%**, dimana anggaran tersebut dapat menyelesaikan sebanyak 31 perkara prodeo.

Dengan demikian, Realisasi Volume Keluaran (RVK) telah sesuai dengan Target Volume Keluaran (TVK) yang ditetapkan sebanyak sebanyak 20 Perkara, dimana capain keluaran yang diperoleh pada Tahun 2023 adalah

sebesar **155%**, yang didapatkan dari rumus (31 perkara : 20 Perkara x 100%).

Tabel Rekapulasi Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2023

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Progres (%)
Perkara ditingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	16.920.00	16.918.000	155%	20	31	155%

Bab III

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu unsur pokok dalam kegiatan manajemen dan merupakan bagian yang dapat menggerakkan roda administrasi untuk pemberian dukungan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Sumber Daya manusia terdiri dari Teknis Yudisial dan Non Teknis berjumlah sebanyak 26 orang/personil dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
 - Ketua : 1 orang
 - Wakil Ketua : 1 orang
 - Hakim : 3 orang
 - Panitera : 1 orang
 - Panitera Muda : 2 orang
 - Panitera Pengganti : 0 orang
 - Jurusita : 4 orang
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial.
 - Sekretaris : 1 orang
 - Kepala Sub Bagian : 3 orang
 - Fungsional : 2 Orang
 - Staf/Pelaksana/Fungsional : 8 orang

Adapun SDM Teknis Yudisial dan Non Teknis Pengadilan Agama Muara Enim sesuai dengan bagan struktur organisasi dapat dilihat sebagaimana dibawah ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Sesuai struktur organisasi, sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Agama Muara Enim terdiri dari 12 orang tenaga teknis dan 14 orang tenaga non teknis, yang seluruhnya berjumlah sebanyak 26 orang. Adapun komposisi SDM tersebut diuraikan sebagaimana berikut ini :

Tabel Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan/Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Nama Pegawai	Jabatan Terakhir	TMT Jabatan	Pangkat	Golongan Ruang	Pendidikan
Suspawati, S.Ag.	Ketua Hakim Madya Muda	10-02-2022	Pembina TK1	IV/b	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua Hakim Madya Pratama	21-09-2023	Pembina	IV/a	S-2 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.	Hakim Madya Utama	25-04-2019	Pembina Tingkat I	IV/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum

Yeni Kurniati, S.H.I.	Hakim Madya Pratama	19-11-2020	Penata Tingkat I	IV/a	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Rezha Nur Adikara, S.H.I.	Hakim Pratama Muda	05-12-2022	Penata TK1	III/b	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Karbudin, S.Ag.	Panitera	20-03-2023	Pembina	IV/a	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Hendri Suryana, S.Ag.	Sekretaris	15-08-2022	Pembina	IV/a	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Firdaus, S.H.I.	Panitera Muda Hukum	01-04-2022	Penata TK1	III/d	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Luthfi Hadisaputra, S.H.I.	Panitera Pengganti	15-06-2021	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Yeni Puspita, S.Ag.	Kepala Sub Bagian kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	06-03-2017	Penata Tingkat I	III/d	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Rahmi Oktaria, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	06-03-2017	Penata Tingkat I	III/d	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Endah Rosmala Dewi, S.S.I.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	01-04-2023	Penata Muda TK1	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Komputer
Kaim Nahrudin, S.H.	Jurusita	30-03-2020	Penata Tingkat I	III/d	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Fanani	Jurusita	21-06-2015	Penata Muda Tingkat I	III/b	SMA
Suprayogi Pamungkas, S.H.	Jurusita	30-03-2020	Penata Muda	III/a	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Jaka Prahmana	Jurusita	13-10-2023	Pengatur TK1	II/d	SMK
Zayan Rohanda, S.H.	Operator Layanan Operasional	02-10-2023	Penata	III/d	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Novita Anggraini, S.SI	Pranata Komputer	31-08-2022	Penata Muda	III/a	S-1 Program Studi Ilmu Komputer

Diska Prianti, A.Md.	Arsiparis Pelaksana	27-10-2023	Pengatur	II/c	D-III Program Studi Poltek
Nadia Romadhon, S.H.	Klerek Analis Perkara Peradilan	02-10-2023	Penata Muda	III/a	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Septa Tri Sanjaya, S.H.	Klerek Analis Perkara Peradilan	02-10-2023	Penata Muda	III/a	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Adila Shabrina, S.H.	Klerek Analis Perkara Peradilan	02-10-2023	Penata Muda	III/a	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Sarita Fitri Moniko, S.IP.	Klerek Penelaah Teknis Kebijakan	02-10-2023	Penata Muda	III/a	S-1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Sulastri, A.Md.	Klerek Pengelola Penanganan Perkara	02-10-2023	Pengatur	II/c	D-III Administrasi Bisnis
Rusia A.Md.	Klerek Pengelola Penanganan Perkara	02-10-2023	Pengatur	II/c	D-III Administrasi Bisnis
Hayati, A.Md.	Pengelola Perkara	01-03-2022	Pengatur	II/c	D-III Administrasi Bisnis

Dari 26 orang SDM yang ada tersebut, sebanyak 4 orang merupakan golongan II/c (Pengatur), jumlah tersebut sebesar 15,38% dari jumlah SDM. Sebanyak 1 orang golongan II/d (Pengatur Tk.1) jumlah tersebut sebesar 3,8%. Sebanyak 5 orang merupakan golongan III/a (Penata Muda), jumlah tersebut sebesar 19,23% dari jumlah SDM. Sebanyak 2 orang merupakan golongan III/b (Penata Muda Tk.I) sebesar 7,6% dari jumlah SDM. Sebanyak 2 orang merupakan golongan III/c (Penata), jumlah tersebut sebesar 6,9% dari jumlah SDM. Sebanyak 5 orang merupakan golongan III/d (Penata Tingkat I), jumlah tersebut sebesar 17,2% dari jumlah SDM.

Sebanyak 4 orang merupakan golongan IV/a (Pembina), jumlah tersebut sebesar 15,38% dari Jumlah SDM. Sebanyak 1 orang merupakan golongan IV/b (Pembina Tingkat I), jumlah tersebut sebesar 3,8% dari jumlah SDM. Sebanyak 1 orang merupakan golongan IV/c (Pembina

Utama Muda), jumlah tersebut sebesar 3,4% dari jumlah SDM. Adapun komposisi SDM tersebut diuraikan sebagaimana berikut ini :

Tabel Komposisi SDM Berdasarkan Pangkat /Golongan

Jenjang Golongan Ruang	Jumlah	Komposisi
IV/e	0	0%
IV/d	0	0%
IV/c	1	3,8%
IV/b	1	3,8%
IV/a	4	15,38%
III/d	5	19,23%
III/c	2	7,6%
III/b	2	7,6%
III/a	6	23%
II/d	1	3,8%
II/c	4	13,8%
II/a	0	0%
Jumlah	26	100%

Dari 26 orang SDM yang ada tersebut, sebanyak 2 orang memiliki jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK, jumlah tersebut hanya 7,69% dari jumlah SDM yang ada saat ini. 4 orang memiliki jenjang D-III jumlah tersebut hanya 15,38% dari jumlah SDM saat ini. Sedangkan yang memiliki jenjang pendidikan tingkat S-1 jumlahnya sebanyak 19 orang, dimana jumlah tersebut mencapai 73,0% dari jumlah SDM. Kemudian untuk jenjang pendidikan tingkat S-2 adalah sisanya sebanyak 1 orang, jumlah tersebut hanya 3,8% dari jumlah SDM. Adapun komposisi SDM tersebut diuraikan sebagaimana berikut ini :

Tabel Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Komposisi
S-3	0	0 %
S-2	1	3,8 %
S-1 / D-IV	19	73 %
D-III	4	15,38 %
D-II	0	0 %
D-I	0	0 %

SMA/SMK	2	7,69 %
SMP	0	0 %
Jumlah	26	100 %

1. Mutasi

Mutasi bagi Pegawai Negeri dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Selama Tahun 2023 SDM Pengadilan Agama Muara Enim mendapat mutasi sebagai berikut :

Tabel Mutasi dan Promosi Hakim Tahun 2023

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
Gita Febrita, S.H.I., M.H	Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Ketua Pengadilan Agama Rembang Kelas IB	Rapim 04 September 2023

2. Promosi

Tabel Promosi Pejabat Fungsional Tahun 2023

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
Drs. Efendi	Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IB	Rapim 8 Maret 2023
Azhari, S.H., M.Si	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palembang Kelas IA	Rapim 28 November 2022
Maryam, S.H	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas IA	Rapim 2 Oktober 2023
Rendy, A., S.H.I	Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Baturaja Kelas IA	23 Oktober 2023

Tabel Promosi Pejabat Struktural Tahun 2023

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
-	-	-	-

3. Pindah Tugas

Tabel Pindah Tugas Pegawai Tahun 2023

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
Ary Puspita Yudaha, S.T	Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Lahat Kelas IB	4 Agustus 2023
Yessi Puspitasari, A.Md	Arsiparis Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Arsiparis Pengadilan Agama Metro Kelas IA	

4. Pensiun

Tabel Pensiun Pegawai Tahun 2023

Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan	TMT Pensiun	Status Pensiun
-	-	-	-	-

5. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)

Pembinaan SDM terhadap tenaga teknis yustisial yang terdiri hakim dan panitera serta jurusita dengan mengikuti pendalaman materi hukum formil dan materiil. Adapun data pelatihan dan pembinaan sebagai berikut :

Tabel Diklat Tenaga Teknis Tahun 2023

Nama	Jabatan	Nama Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Karbudin, S.Ag. Firdaus S.HI. Sulastri, A.Md.	Panitera Panitera Muda Hukum Pengelola Perkara	Bimbingan Teknis Penyelesaian Administrasi Perkara secara elektronik pada PTA Palembang dan PA Sewilayah PTA Palembang Tahun 2023	PTA Palembang bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Palembang	29 s.d. 31 Maret 2023

Tabel Diklat Tenaga Non Teknis Tahun 2023

Nama	Jabatan	Nama Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Endah Rosmala Dewi, S.SI. Ary Puspita Yudha, S.T	Kasubbag PTIP Bendahara Pengeluaran	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Pusdiklat Menpin Megamendung Bogor	12 Mei s.d 7 Agustus 2023
Hendri Suryana, S.Ag.	Sekretaris Kasubbag	Bimbingan Teknis SAKIP dan SPIP	Hotel Beston Palembang	11 s.d. 13 Desember 2023

Endah Rosmala Dewi, S.Si.	PTIP			
Luthfi Hadisaputra, S.H. Rusia, A.Md.	Panitera Muda Permohonan Pengelola Perkara	Pembinaan dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Hotel Ibis Style Jakarta	13 s.d. 16 Desember 2023

Bab IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

Alokasi anggaran Pengadilan Agama Muara Enim memiliki dua macam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yakni DIPA unit organisasi pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor SP DIPA-005.01.2.402282/2023, dan DIPA unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor SP DIPA-005.04.2.402283/2023. DIPA tersebut disahkan pada tanggal 30 November 2022

Tabel DIPA 01 Tahun Anggaran 2023

Program	Kegiatan	Output	Anggaran	Volume Keluaran
005.01. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1066. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1066.EAA.001 . Layanan Perkantoran 001 Gaji dan Tunjangan	3.023.335.000	1 Layanan
005.01. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1066. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1066.EAA.001 . Layanan Perkantoran 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.329.114.000	1 Layanan
005.01. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1066. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1066.EBA.962 . Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 051 Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	15.561.000	1 Layanan
005.01. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1071. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1071.EBB.951 Layanan Sarana Internal 051 Pengadaan kendaraan bermotor	279.300.000	1 Unit
005.01. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1071. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1071.EBB.951 Layanan Sarana Internal 052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	5.430.000	2 unit

005.01. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1071. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1071.EBB.951 Layanan Sarana Internal 053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	519.100.000	9 unit
005.01. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1071. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1071.EBB.971 Layanan Prasarana Internal 051 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	79.742.000	2 unit
Jumlah			5.251.582.000	

Tabel DIPA 04 Tahun Anggaran 2023

Program	Kegiatan	Output	Anggaran	Volume Keluaran
005.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053.QBA.003 Layanan Bantuan Hukum Perseorangan 051.Pos Bantuan Hukum	50.000.000	624 JL
005.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053.QCA.001 Perkara Hukum Perseorangan 051. Pembebasan Biaya Perkara	16.920.000	31 Pkr
005.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053.QCA.001 Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung 051. Pembebasan Biaya Perkara	50.400.000	104 Pkr
005.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053.QCA.003 Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu 051. Layanan Sidang Terpadu	25.000.000	251 Pkr
Jumlah			142.320.000	

B. REVISI ANGGARAN

Tabel Revisi Ke-1 DIPA 01

**SATKER : (402282) Pengadilan Agama Muara Enim
(Revisi 1) – 13 Februari 2023**

Revisi hanya dilakukan pada Halaman III DIPA, yakni rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan.

Tabel Revisi Ke-2 DIPA 01

**SATKER : (402282) Pengadilan Agama Muara Enim
(Revisi 2) – 20 Februari 2023**

Tabel Revisi :

Kode	Uraian	Semula	Menjadi	Selisih
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 5.013.036.000	Rp 5.013.036.000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.683.306.000	Rp 4.683.306.000	
1066.EBA.962	Layanan Umum			
C	Inventaris Perkantoran CPNS	Rp 15.561.000	Rp 15.561.000	
521252	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	Rp 15.561.000	Rp 15.561.000	
	-Pengadaan Inventaris CPNS (Meja)	Rp 7.780.500	Rp 6.930.000	Rp (850.500)
	-Pengadaan Inventaris CPNS (Kursi)	Rp 7.780.500	Rp 6.930.000	Rp (850.500)
	-Kursi Fiberglass / Plastik		Rp 1.701.000	Rp 1.701.000
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp 4.667.745.000	Rp 4.667.745.000	
B	Langganan Daya dan Jasa	Rp 223.398.000	Rp 219.978.000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 171.000.000	Rp 167.580.000	Rp (3.420.000)
C	Pemeliharaan Kantor	Rp 430.978.000	Rp 426.838.000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 186.342.000	Rp 182.202.000	Rp (4.140.000)
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	Rp 96.822.000	Rp 98.022.000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 68.316.000	Rp 75.876.000	Rp 7.560.000
G	Konsultasi ke KANWIL/DJPB/KPPN/KPKNL			
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 14.200.000	Rp 14.200.000	
	Penginapan (1 ORG x 1 HARI x 4 KEG)	Rp 2.600.000	Rp 2.200.000	Rp (400.000)
	Uang Harian ke Kanwil DJPB (2 ORG x 2 HARI x 4 KEG)	Rp 6.000.000	Rp 4.800.000	Rp (1.200.000)
	Transport ke Kanwil DJPB (2 ORG x 1 PP x 4 KEG)	Rp 2.000.000	Rp 1.600.000	Rp (400.000)
	Uang Harian ke KPPN / KPKNL (1 ORG x 1 Hari x 28 KEG)	Rp 3.600.000	Rp 4.200.000	Rp 600.000
	Transport ke KPPN / KPKNL (1 ORG x 1 PP x 28 KEG)		Rp 1.400.000	Rp 1.400.000

Tabel Revisi Ke-3 DIPA 01

SATKER : (402282) Pengadilan Agama Muara Enim
(Revisi 3) – 11 April 2023

Revisi hanya dilakukan pada Halaman III DIPA, yakni rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan.

Tabel Revisi Ke-4 DIPA 01

SATKER : (402282) Pengadilan Agama Muara Enim
(Revisi 4) – 11 April 2023

Revisi hanya dilakukan pada Halaman III DIPA, yakni rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan.

Tabel Revisi :

Kode	Uraian	Semula	Menjadi	Selisih
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 5.013.036.000	Rp 5.013.036.000	Rp -
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.683.306.000	Rp 4.683.306.000	Rp -
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp 4.683.306.000	Rp 4.683.306.000	Rp -
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp 3.338.631.000	Rp 3.338.631.000	Rp -
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp 3.338.631.000	Rp 3.338.631.000	Rp -
521111	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 1.058.703.000	Rp 1.280.467.000	Rp 221.764.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 19.000	Rp 21.000	Rp 2.000
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	Rp 105.873.000	Rp 96.221.000	Rp (9.652.000)
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	Rp 25.955.000	Rp 20.559.000	Rp (5.396.000)
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	Rp 36.400.000	Rp 40.320.000	Rp 3.920.000
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp 1.523.310.000	Rp 1.434.202.000	Rp (89.108.000)
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	Rp 303.557.000	Rp 156.072.000	Rp (147.485.000)
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp 60.466.000	Rp 68.655.000	Rp 8.189.000
511129	Belanja Tunjangan Uang Makan PNS	Rp 211.992.000	Rp 219.019.000	Rp 7.027.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp 12.356.000	Rp 23.095.000	Rp 10.739.000
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Rp 329.730.000	Rp 329.730.000	
051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Rp 329.730.000	Rp 329.730.000	
A	Pengadaan Kendaraan Dinas	Rp 329.730.000	Rp 279.300.000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 329.730.000	Rp 279.300.000	Rp (50.430.000)
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp -	Rp 50.430.000	
A	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 45.000.000	

532111	Pengadaan AC Split 2 Pk (5 Unit)	Rp -	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp -	Rp 5.430.000	
532111	Telephone Mobile (Handphone)	Rp -	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000
	Pengadaan Printer	Rp -	Rp 1.680.000	Rp 1.680.000

Tabel Revisi Ke-5 DIPA 01 (ABT)

SATKER : (402282) Pengadilan Agama Muara Enim
(Revisi 5) – 20 September 2023

Tabel Revisi:

Kode	Uraian	Semula	Menjadi	Selisih
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 5.013.036.000	Rp 5.013.036.000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.683.306.000	Rp 4.683.306.000	
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp 4.667.745.000	Rp 4.667.745.000	
F	Koordinasi ke Pusat/ Tingkat Banding/ Tingkat Pertama			
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 50.880.000	Rp 50.880.000	
	Penginapan (2 ORG x 1 HARI x 12 KEG)	Rp 12.480.000	Rp 18.880.000	Rp 6.400.000
	Uang Harian (4 ORG x 2 HARI x 12 KEG)	Rp 28.800.000	Rp 28.800.000	Rp -
	Transport ke Kanwil DJPB (4 ORG x 1 PP x 412 KEG)	Rp 9.600.000	Rp 3.200.000	Rp (6.400.000)

Tabel Revisi Ke-6 DIPA 01

SATKER : (402282) Pengadilan Agama Muara Enim
(Revisi 6) – 5 Oktober 2023

Tabel Revisi:

KODE	URAIAN	SEMULA	MENJADI	SELISIH
		Pengurangan / Ditarik Pusat	Penambahan	
1	2	3	4	5
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 5.516.878.000	Rp 5.566.878.000	Rp (50.000.000)
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 833.572.000	Rp 883.572.000	Rp (50.000.000)

1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Rp 753.830.000	Rp 803.830.000	Rp (50.000.000)
051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Rp 279.300.000	Rp 279.300.000	Rp -
A	Pengadaan Kendaraan Dinas	Rp 279.300.000	Rp 279.300.000	Rp -
532111	Kendaraan Roda 4	Rp 279.300.000	Rp 279.300.000	Rp -
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp 5.430.000	Rp 5.430.000	Rp -
A	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 5.430.000	Rp 5.430.000	Rp -
532111	Pengadaan Printer	Rp 1.680.000	Rp 1.680.000	Rp -
	Pengadaan Telephone Mobile (Handphone)	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000	Rp -
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp 469.100.000	Rp 519.100.000	Rp (50.000.000)
532111	Pengadaan Meubelair	Rp -	Rp 50.000.000	Rp (50.000.000)
	Pengadaan Kursi Roda	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	Rp -
	Pengadaan Kursi Ruang Tunggu Disabilitas	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000	Rp -
	Pengadaan AC Split 2 PK	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000	Rp -
	Pengadaan Genset	Rp 413.700.000	Rp 413.700.000	Rp -
	Panic Button	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Rp -

Tabel Revisi Ke-7 DIPA 01

SATKER : (402282) Pengadilan Agama Muara Enim
(Revisi 7) – 6 November 2023

Tabel Revisi:

Kode	Uraian	Semula	Menjadi	Selisih
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 5.251.582.000	Rp 5.251.582.000	
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp 4.352.449.000	Rp 4.352.449.000	Rp -
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1.329.114.000	Rp 1.329.114.000	Rp -
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	Rp 450.421.000	Rp 452.091.000	Rp 1.670.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 395.237.000	Rp 396.907.000	Rp 1.670.000
	Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	Rp 20.950.000	Rp 22.620.000	Rp 1.670.000
B	Langganan daya dan Jasa	Rp 219.978.000	Rp 218.308.000	Rp (1.670.000)
522141	Belanja Sewa	Rp 3.000.000	Rp 1.330.000	Rp (1.670.000)
	Langganan Web Hosting	Rp 3.000.000	Rp 1.330.000	Rp (1.670.000)
C	Pemeliharaan Kantor	Rp 426.838.000	Rp 426.838.000	Rp -
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 182.202.000	Rp 182.202.000	Rp -

	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Rp 27.318.400	Rp 27.318.400	Rp -
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Rp 2.465.000	Rp 2.465.000	Rp -
	Pemeliharaan Ac	Rp 4.880.000	Rp 7.930.000	Rp 3.050.000
	Pemeliharaan Printer	Rp 8.970.000	Rp 8.320.000	Rp (650.000)
	Pemeliharaan PC/Laptor	Rp 21.900.000	Rp 19.500.000	Rp (2.400.000)
F	Koordinasi Ke Pusat/Tingkat Banding/Tingkat Pertama	Rp 50.880.000	Rp 57.330.000	Rp 6.450.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 50.880.000	Rp 57.330.000	Rp 6.450.000
	Penginapan (2 ORG x 1 Hari x 15 Keg)	Rp 12.480.000	Rp 15.330.000	Rp 2.850.000
	Uang Harian (4 Org x 2 Hari x 15 Keg)	Rp 28.800.000	Rp 36.000.000	Rp 7.200.000
	Transport (2 Org x 1 PP x 15 Keg)	Rp 9.600.000	Rp 6.000.000	Rp (3.600.000)
G	Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DJPB/KPKNL	Rp 14.200.000	Rp 7.750.000	Rp (6.450.000)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 14.200.000	Rp 7.750.000	Rp (6.450.000)
	Penginapan (1 Org x 1 Hari x 1 Keg)	Rp 2.200.000	Rp 550.000	Rp (1.650.000)
	Uang Harian Ke Kanwil/DJPB (2 Org x 2 Hari x 1 Keg)	Rp 4.800.000	Rp 1.200.000	Rp (3.600.000)
	Transport Ke Kanwil (2 Org x 1 PP x 1 Keg)	Rp 1.600.000	Rp 400.000	Rp (1.200.000)
	Uang Harian Ke KPPN/KPKNL (1 Org x 1 PP x 28 Keg)	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000	Rp -
	Transport ke KPPN/KPKNL (1 Org x 1 PP x 28 Keg)	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000	Rp -

Tabel Revisi Ke-8 DIPA 01

SATKER : (402282) Pengadilan Agama Muara Enim
(Revisi 8) – 5 Desember 2023

Tabel Revisi:

Kode	Uraian	Semula	Menjadi	Selisih
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 5.251.582.000	Rp 5.251.582.000	Rp -
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.368.010.000	Rp 4.368.010.000	Rp -
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp 4.368.010.000	Rp 4.368.010.000	Rp -
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp 3.023.335.000	Rp 3.023.335.000	Rp -
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp 3.023.335.000	Rp 3.023.335.000	Rp -
511.111	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 1.307.780.000	Rp 1.299.276.000	Rp (8.504.000)
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp 1.139.940.000	Rp 1.145.480.000	Rp 5.540.000
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	Rp 128.343.000	Rp 131.307.000	Rp 2.964.000

C. REALISASI ANGGARAN

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional DIPA 01 Tahun Anggaran 2023

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
002.OA Kebutuhan sehari-hari perkantoran	452.091.000	448.678.761	99,25%	3.412.239	0,75%
002.OB Langganan daya dan jasa	218.308.000	213.490.068	97,79%	4.817.932	2,21%
002.OC Pemeliharaan kantor	426.838.000	426.818.860	100,00%	19.140	0,00%
002.OD Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	104.382.000	104.382.000	100,00%	-	0,00%
002.OE Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan	1.935.000	1.935.000	100,00%	-	0,00%
002.OF Koordinasi ke pusat/tingkat banding/tingkat pertama	57.330.000	57.232.287	99,83%	97.713	0,17%
002.0G Konsultasi ke kppn/kanwil djpb/kpknl	7.750.000	7.100.000	91,61%	650.000	8,39%
002.OH Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	60.480.000	60.480.000	100,00%	-	0,00%
Jumlah	1.329.114.000	1.320.116.976	99,32%	8.997.024	0,68%

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional DIPA 01 Tahun Anggaran 2023

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
051.0C Inventaris Perkantoran CPNS	15.561.000	15.560.000	99,99%	1.000	0,01%
Jumlah	5.000.000	5.000.000	100,00%	-	0,00%

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Pegawai DIPA 01 Tahun Anggaran 2023

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Belanja Gaji Pokok PNS	1.299.276.000	1.299.176.100	99,99%	99.900	0,01%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.000	18.679	93,40%	1.321	6,61%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	88.108.000	86.898.866	98,63%	1.209.134	1,37%
Belanja Tunj. Anak PNS	19.475.000	19.111.680	98,13%	363.320	1,87%
Belanja Tunj. Struktural PNS	40.320.000	40.320.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.145.480.000	1.145.480.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Tunj. PPH PNS	131.307.000	131.306.371	100,00%	629	0,00%
Belanja Tunj. Beras PNS	66.336.000	65.684.940	99,02%	651.060	0,98%
Belanja Uang Makan PNS	209.913.000	207.822.000	99,00%	2.091.000	1,00%

Belanja Tunjangan Umum PNS	23.100.000	22.545.000	97,60%	555.000	2,40%
Jumlah	3.023.335.000	3.018.363.636	99,84%	4.971.364	0,16%

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Modal DIPA 01 Tahun Anggaran 2023

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.430.000	5.430.000	100,00%	0	0%
Jumlah	10.000.000	10.000.000	100,00%	0	0%

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 04 Tahun Anggaran 2023

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
1053.QBA.003					
Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	50.000.000	50.000.000	100,00%	-	0,00%
1053.QCA.001					
Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	16.920.000	16.918.000	99,99%	2.000	0,01%
1053.QCA.002					
Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	50.400.000	50.300.000	99,80%	100.000	0,20%
1053.QCA.003					
Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui	25.000.000	24.850.000	99,40%	150.000	0,60%
Jumlah	142.320.000	142.068.000	99,82%	252.000	0,18%

Pada Tahun 2023 ini Pengadilan Agama Muara Enim telah memperoleh penghargaan dari KPPN Lahat sebagai Peringkat II atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Kategori Pagu Kecil (dibawah 10 Milyar) Periode Tahun 2022.

Gambar Penghargaan IKPA Pengadilan Agama Muara Enim Tahun Anggaran 2023



D. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Tabel PNBP 402282 (01) Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian Jenis Pendapatan	Realisasi pendapatan
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	549.270
Jumlah		549.270

Tabel PNBP 402283 (04) Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian Jenis Pendapatan	Realisasi pendapatan
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	1.570.000
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	43.880.000
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	77.133.900
Jumlah		122.583.900

E. PENGELOLAAN BIAYA PERKARA

Tabel Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

NO	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	Sisa Awal	44.733.000	-
2	Penerimaan Bulan Ini	1.981.542.230	-
3	Biaya Proses ATK/Pemberkasan		118.280.000
4	Biaya Panggilan	-	734.543.900
5	Biaya Penerjemah	-	-
6	Biaya Pemberitahuan	-	158.787.400
7	Biaya Sita	-	-
8	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	7.550.000
9	Biaya Sumpah	-	-
10	Pengiriman Biaya Perkara	-	1.400.000
11	Biaya Materai	-	14.640.000
12	PNBP		
	Biaya Pendaftaran	-	44.300.000
	Biaya Redaksi	-	14.620.000
	Biaya PNBP Lainnya	-	37.740.000
13	Lain-Lain	-	-
14	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara	-	867.001.230
	Jumlah Pengeluaran	-	1.998.862.530
	JUMLAH	2.026.275.230	2.026.275.230
	SALDO AKHIR	27.412.700	
	SALDO BANK	15.079.100	

Tabel Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Saldo Awal	588.000		
Penerimaan	116.320.000		
Pengeluaran		116.738.000	
Saldo Akhir			
Jumlah	116.908.000	116.738.000	170.000

Tabel Biaya Sita Jaminan/Eksekusi/Lelang

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Saldo Awal	0	0	0
Penerimaan	0	0	0
Biaya Materai	0	0	0
Biaya Leges	0	0	0
Biaya Sita Eksekusi	0	0	0
Biaya Juru Sita	0	0	0
Biaya Pengumuman Lelang/Iklan	0	0	0
Biaya Juru Lelang	0	0	0

Biaya Lelang	0	0	0
Biaya Saksi	0	0	0
Biaya Pemberitahuan	0	0	0
Biaya Keamanan	0	0	0
Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi	0	0	0
PNBP	0	0	0
Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Saldo Akhir	0	0	0

Tabel Biaya Sita Jaminan/Eksekusi/Lelang

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Saldo Awal	0	0	0
Penerimaan (Uang Konsinyasi dan Panjar Konsinyasi)	0	0	0
Biaya Pelaksanaan Penawaran	0	0	0
Biaya pendaftaran	0	0	0
Biaya Proses/ATK	0	0	0
Redaksi	0	0	0
Materai	0	0	0
Leges	0	0	0
Pengambilan Uang Konsinyasi	0	0	0
Biaya Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Saldo Akhir	0	0	0

F. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Gedung

Dalam pembangunan gedung Kantor Pengadilan tidak boleh mengesampingkan ciri khas dari pada gedung kantor yang ada pada bagian depan mempunyai 4 (empat) pilar/tiang kokoh berdiri tegak menunjukkan kewibawaan, Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding tempat para Hakim menegakkan hukum dan keadilan merupakan tempat yang terhormat yang harus di jaga kewibawaannya. Oleh karena itu peradilan harus dijaga kehormatan dan kewibawaannya, untuk mencapai derajat ini maka aparat peradilan, Hakim khususnya

harus memiliki integritas moral yang tinggi dan tiada cacat celanya dan harus memiliki pula kemampuan profesional yang dapat diandalkan serta kematangan ilmu intelektual dapat diteladani oleh masyarakat luas.

Disamping itu 4 (Empat) pilar juga mengandung azas proses peradilan yaitu : cepat, sederhana, biaya ringan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat yang dicita-citakan oleh Undang-Undang. Pengadilan Agama Muara Enim yang berkedudukan di Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H., Nomor 1, Desa Kepur, Muara Enim dengan luas bangunan 1.400 M² yang terdiri dari 2 (dua) lantai.

Tabel Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan Agama Muara Enim

Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
Ruang Ketua	1	Lantai II
Ruang Tunggu Ketua	1	Lantai II
Ruang Wakil Ketua	1	Lantai II
Ruang Hakim	1	Lantai II
Ruang Panitera	1	Lantai II
Ruang Sekretaris	1	Lantai II
Ruang Sidang Utama	1	Lantai I
Ruang Sidang 1 dan 2	2	Lantai I
Ruang Rapat / Media Center	1	Lantai II
Ruang Kepaniteraan (Panmud dan PP)	1	Lantai I
Ruang Panmud Hukum	1	Lantai I
Ruang Juru Sita	1	Lantai I
Ruang Kesekretariatan	1	Lantai I
Ruang Bendahara	1	Lantai I
Ruang Server IT	1	Lantai I
Ruang Panel	1	Lantai I
Ruang Mediasi	1	Lantai I
Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Lantai I
Ruang Tunggu Sidang	1	Lantai I
Ruang Bermain Anak	1	Lantai I
Ruang Laktasi	1	Lantai I

Ruang Medis	1	Lantai I
Ruang Tunggu Advocad	1	Lantai I
Ruang Perpustakaan	1	Lantai II
Dapur	1	Lantai I
Gudang	2	Lantai 1 dan Lantai II
Ruang Arsip Perkara	2	Lantai 1 dan Lantai II
Toilet Ketua	1	Lantai II
Toilet Wakil Ketua	1	Lantai II
Toilet Hakim	2	Lantai II
Toilet Panitera	1	Lantai II
Toilet Sekretaris	1	Lantai II
Ruang Janitor	1	Lantai II
Toilet Kesekretariatan	2	Lantai 1
Toilet Kepaniteraan	2	Lantai 1
Toilet Pengunjung Wanita	2	Lantai I
Toilet Pengunjung Pria	2	Lantai I
Ruang Smoking Area Pegawai	1	Lantai 1
Ruang Smoking Area Pengunjung	1	Lantai 1
Ruang Tunggu Terbuka	1	Lantai 1
Pos Satpam	2	Lantai I
Mushollah	1	Lantai 1
Toilet Mushollah	2	Lantai 1
Toilet Disabilitas	1	Lantai I

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Enim mendapatkan anggaran diperuntukkan pemeliharaan gedung kantor, dan halaman kantor sebesar Rp. 235.636.000,- (*Dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), dengan realisasi sebesar 99,99 %. Sedangkan untuk Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya (pemeliharaan rumah dinas) sebesar Rp 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*) dengan realisasi sebesar 99,89%.

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	235.636.000	214.690.000	99,99%	1000	0,01%
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9.000.000	8.990.000	99,89%	10.000	0,11%

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Pengadilan Agama Muara Enim memiliki sarana dan prasarana fasilitas gedung berupa diantaranya sebagai berikut :

Tabel Sarana/Prasarana Fasilitas Gedung

SARAN	Jumlah	KETERANGAN
A.C. Split	31	Kondisi Baik 10 ,Kondisi Rusak Berat 21
Air Conditioning (AC)	5	Kondisi Baik 5
Audio Mixing Console	1	Kondisi Baik 1
Bangku Panjang Besi/Metal	18	Kondisi Baik 17,Kondisi Rusak Ringan 1
Bracket Standing Peralatan	1	Kondisi Baik 1
Brandkas	2	Kondisi Baik 1 ,Kondisi Rusak Berat 1
Camera Conference	1	Kondisi Baik 1
CCTV - Camera Control Television System	10	Kondisi Baik 10
Dispenser	12	Kondisi Baik 11 ,Kondisi Rusak Berat 1
Facsimile	1	Kondisi Baik 1
Filing Cabinet Besi	2	Kondisi Baik 2
Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	1	Kondisi Baik 1
Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Kondisi Baik 1
Genset	1	Kondisi Baik 1
Gordyin/Kray	1	Kondisi Baik 1
Handy Cam	1	Kondisi Baik 1
Jam Elektronik	3	Kondisi Baik 3
Kipas Angin	3	Kondisi Baik 3
Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1	,Kondisi Rusak Berat 1
Kursi Besi/Metal	210	Kondisi Baik 187 ,Kondisi Rusak Berat 23
Kursi Fiber Glas/Plastik	20	Kondisi Baik 20
Kursi Kayu	59	Kondisi Baik 58,Kondisi Rusak Ringan 1
Kursi Roda	2	Kondisi Baik 2

Lambang Garuda Pancasila	2	Kondisi Baik 2
Lambang Instansi	2	Kondisi Baik 2
LCD Monitor	1	Kondisi Baik 1
Lemari Besi/Metal	9	Kondisi Baik 9
Lemari Kayu	7	Kondisi Baik 7
Loudspeaker	4	Kondisi Baik 4
Meja Kerja Besi/Metal	7	Kondisi Baik 7
Meja Kerja Kayu	102	Kondisi Baik 92 ,Kondisi Rusak Berat 10
Meja Komputer	2	Kondisi Baik 2
Mesin Absensi	1	Kondisi Rusak Berat 1
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Kondisi Rusak Berat 1
Meubelair Lainnya	3	Kondisi Baik 3
Microphone	7	Kondisi Baik 7
Numerator	1	Kondisi Baik 1
Palu Sidang	1	Kondisi Baik 1
Panic Button System, Alarm Indicator	1	Kondisi Baik 1
Papan Visual/Papan Nama	6	Kondisi Baik 6
Pataka	1	Kondisi Rusak Berat 1
Rollmeter	1	Kondisi Baik 1
Serial Scanner/Printer	2	Kondisi Baik 2
Sice	7	Kondisi Baik 6 ,Kondisi Rusak Berat 1
Sound System	3	Kondisi Baik 1 ,Kondisi Rusak Berat 2
Telephone (PABX)	1	Kondisi Baik 1
Telephone Mobile	1	Kondisi Baik 1
Televisi	4	Kondisi Baik 2 ,Kondisi Rusak Berat 2
Teropong/Keker	1	Kondisi Rusak Berat 1
Tiang Bendera	1	Kondisi Baik 1
Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	Kondisi Baik 7
Video Cassette	1	Kondisi Rusak Berat 1
CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Kondisi Baik 1
Komputer Jaringan Lainnya	2	Kondisi Baik 2
Lap Top	29	Kondisi Baik 20 ,Kondisi Rusak Berat 9
Local Area Network (LAN)	1	Kondisi Baik 1
P.C Unit	43	Kondisi Baik 21 ,Kondisi Rusak Berat 22
Peralatan Jaringan Lainnya	1	Kondisi Baik 1
Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	Kondisi Baik 10 ,Kondisi Rusak Berat 13
Rak Server	1	Kondisi Baik 1
Router	1	Kondisi Baik 1

Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Kondisi Baik 2
Serial Printer	1	Kondisi Baik 1
Server	2	Kondisi Baik 2

Pengadaan

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 ada belanja modal sebesar Rp **883.572.000,-** (*Delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ribu rupiah*) untuk pengadaan mobil sebanyak 1 unit, peralatan dan mesin sebanyak 1 unit, printer 1 unit, handphone 1 unit, AC 2 unit, genset sebanyak 1 unit, panic button 1 unit, kursi roda 2 unit, kursi ruang tunggu disabilitas 1 unit, meubleir berupa meja sebanyak 2 unit, serta pembuatan toilet disabilitas dan jalur akses disabilitas.

Pemeliharaan

Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor selama satu Tahun Anggaran 2023 berupa pemeliharaan gedung kantor, halaman kantor, gedung dan bangunan lainnya, kendaraan roda 4 , roda 2, pemeliharaan AC, printer dan PC/laptop senilai Rp 426.838.000,- (*Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) dengan realisasi 99,99% senilai **Rp 426.818.860,-** (*Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah*).

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	426.838.000	426.818.860	99.99%	19.140	0.01%

Penghapusan

Pengadilan Agama Muara Enim untuk Tahun 2023 tidak mengajukan proses Penghapusan Barang Milik Negara.

Kendaraan Dinas

Hingga akhir Tahun 2023 jumlah kendaraan dinas yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Muara Enim yaitu :

Tabel Daftar Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Muara Enim

Jenis	Nomor Polisi	Merk/ Tipe	Tahun Pembuatan	Keterangan	ket
Mobil Minibus	BG 10 DZ	Mitsubishi Pajero Sport	2011	Pinjam Pakai Kab. Muara Enim untuk Dinas Jabatan	rusak ringan
Mobil Minibus	BG 1521 DZ	Toyota Innova	2011	Pinjam Pakai Kab. Muara Enim untuk Dinas Jabatan	baik
Mobil Minibus	BG 1184 DZ	Toyota / Rush	2023	Milik PA Muara Enim untuk Dinas Jabatan	baik
Mobil Minibus	BG 1418 DZ	Toyota Kijang Standar	2003	Pinjam Pakai Pemkab Muara Enim untuk Operasional	rusak ringan
Mobil Minibus	BG 1458 PZ	Toyota Avanza	2014	Pinjam Pakai Pemkab. PALI untuk Operasional	baik
Mobil Minibus	BG 239 DZ	Toyota Innova	2007	Milik PA Muara Enim Untuk Operasional	rusak ringan
Sepeda motor	BG 2036 DZ	Honda Supra	2008	Milik PA Muara Enim untuk Dinas Jabatan	rusak ringan
Sepeda Motor	BG 6122 DZ	Honda Mega Pro	2006	Milik PA Muara Enim untuk Dinas Jabatan	rusak ringan
Sepeda Motor	BG 6121 DZ	Honda Mega Pro	2006	Milik PA Muara Enim untuk Dinas Jabatan	rusak ringan
Sepeda motor	BG 2036 DZ	Honda Supra	2008	Milik PA Muara Enim untuk Dinas Jabatan	rusak ringan
Sepeda Motor	BG 6207 DZ	Honda Supra	2006	Milik PA Muara Enim untuk Operasional	rusak ringan

Rumah Dinas

Hingga akhir Tahun 2023 jumlah rumah dinas yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Muara Enim yaitu :

Tabel Daftar Rumah Dinas

Nama Rumah Dinas	Tahun	Kondisi	Keterangan
Rumah Dinas Ketua	2014	Baik	Pinjam Pakai dari Pemkab Muara Enim
Rumah Negara Gol. II Type B Permanen	2009	Baik	Milik Pengadilan Agama Muara Enim

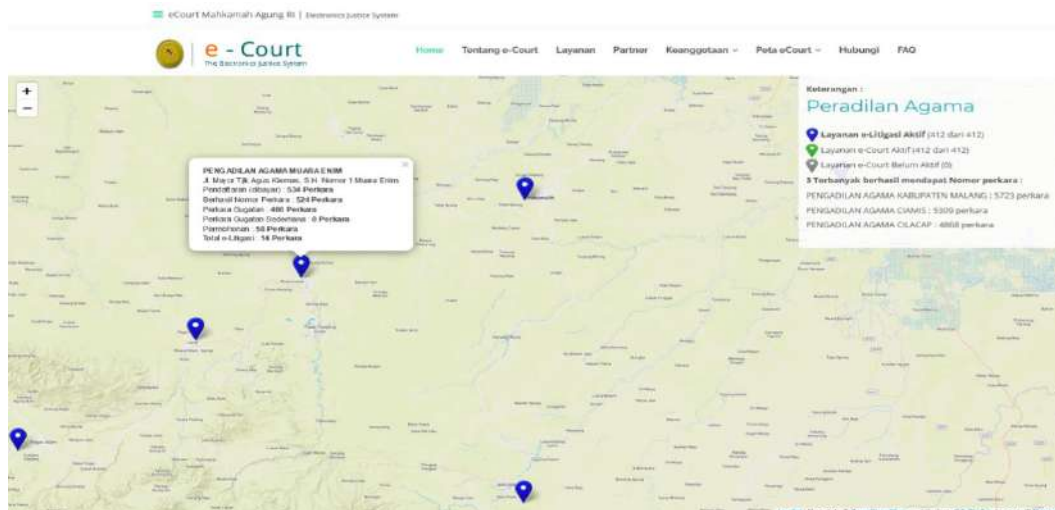
G. Pengelolaan Teknologi Informasi

Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Muara Enim

Sejak Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 5610/DJA/HM.02.3/XI/2019 tanggal 26 November 2019, tentang Implementasi e-litigation di lingkungan peradilan agama, sebagai penerapan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan Agama Muara Enim mengupayakan langkah-langkah yang kongkrit dari tanggal 24 Desember 2019 dan sudah menerima/memproses dan memutus perkara e-court secara biasa maupun e-litigation, serta telah melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk direkap dan di laporkan ke Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama. Secara keseluruhan perkara yang diajukan melalui e-court adalah sebanyak 231 perkara, sedangkan yang bisa terdaftar di Pengadilan Agama Muara Enim berjumlah 231 perkara, yakni gugatan sebanyak 171 perkara, permohonan sebanyak 60 perkara dan gugatan sederhana sebanyak 0 perkara.

Pengadilan Agama Muara Enim pada Tahun 2021 telah mendapatkan Anugerah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Terbaik Peringkat VIII Dalam Pelaksanaan E-Court Pada Kategori Peradilan Agama Kelas IB.

Gambar Peta Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023



Gambar Penghargaan Aplikasi E-Court



Implementasi e-court di Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 adalah dengan lampiran sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Daftar Perkara E-Court Tahun 2023

Uraian	Terdaftar	Dicabut	Putus Secara Elektronik	Putus Secara Biasa	Jumlah Putus	Sisa / Masih Dalam proses
Gugatan Online	171	1	8	157	165	5
Permohonan Online	60	1	1	58	59	0
Gugatan Sederhana Online	0	0	0	0	0	0
Jumlah	231	2	9	215	224	5

Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Muara Enim

Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Enim berhasil memutus sebanyak 1.493 perkara. Jumlah tersebut mencapai **99,33%** dari jumlah beban perkara yang ditangani Tahun 2023, yakni 6 perkara sisa Tahun

2022 ditambah 1.497 perkara diterima Tahun 2023. Hasil tersebut sudah melebihi batas maksimal target sisa perkara sebesar 1%.

Implementasi Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Muara Enim

Berpedoman pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Maka Dirjen Badilag melaunching sebuah inovasi bernama aplikasi gugatan mandiri dan terkait penggunaannya dikeluarkanlah surat nomor 1322/Dja/HM.01/4/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Optimalisasi Aplikasi Gugatan Mandiri. Sejak saat itu Petugas PTSP Pengadilan Agama Muara Enim gencar mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada pencari keadilan hingga pada Tahun 2022 lalu Pengadilan Agama Muara Enim telah mendapatkan Penghargaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung atas Pemanfaatan Aplikasi Gugatan Mandiri Terbanyak ke 3 Kelas IB Tahun 2021.

Gambar Penghargaan Aplikasi Gugatan Mandiri



Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Enim berhasil mensosialisasikan pemanfaatan penggunaan aplikasi gugatan mandiri sebanyak 1115 perkara. Jumlah tersebut mencapai **74,18%** dari jumlah perkara yang masuk di Tahun 2023, yakni 1.503 perkara. Pada Tahun 2023 telah terjadi peningkatan pemanfaatan penggunaan aplikasi gugatan mandiri sebanyak 658 perkara (143,98%) dari 457 perkara di Tahun 2022.

Tabel Rekapitulasi Pemanfaatan Aplikasi Gugatan Mandiri Tahun 2022 dan 2023

Uraian	2022	2023
Cerai Talak	109	231
Cerai Gugat	348	884
Jumlah	457	1115

Bab V

Peningkatan Pelayanan Publik

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam komitmen melaksanakan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM), pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Muara Enim telah berhasil meraih predikat **A (Excellence)** yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 14 Juli 2018 di Balikpapan.

Gambar Sertifikat SAPM Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2018



Selanjutnya Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) Tahun selama 3 (tiga) Tahun terhitung tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan 22 Juni 2021, dengan rencana *audit surveillance* pada Juni 2019, Juni 2020, dan Juni 2021.

Pada *audit surveillance* pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2019, Senin 17 Juni 2019. *Lead Assessor*, Drs. H. Abdullah, S.H., M.H., datang dengan didampingi oleh tiga orang asesor pendamping, diantaranya Hj. Fara Umitha, S.H., Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H., dan Arpita Pitriyanti, S.H., untuk melakukan *audit surveillance* pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2019 di Pengadilan Agama Muara Enim.

Pada *audit surveillance* pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2019 itu, Pengadilan Agama Muara Enim berhasil mempertahankan predikat **A (Excellent)**, sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 5367/DJA/OT.01.3/ X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

Gambar Lampiran Surat Dirjen Badilag Atas Assessment Surveillance APM Tahun 2019

Lampiran Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 5367 /DJA/OT.01.3/X/2019 Tanggal : 30 Oktober 2019				
HASIL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019				
7	PTA Palembang			
1.	PTA Palembang	-	A (Excellent)	Surveillance I 2019
2.	PA Sekayu	II	A (Excellent)	SAPM II 2018
3.	PA Lubuk Linggau	IB	A (Excellent)	SAPM II 2018
4.	PA Kayu Agung	IB	A (Excellent)	Surveillance I 2018
5.	PA Palembang	IA	A (Excellent)	Surveillance I 2018
6.	PA Muara Enim	IB	A (Excellent)	Surveillance I 2019
7.	PA Baturaja	IB	A (Excellent)	Surveillance I 2019
8.	PA Lahat	IB	A (Excellent)	Surveillance I 2019

Pada *audit surveillance* kedua Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2020, Rabu 11 November 2020 Tim Asesmen Eksternal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Wahyu Setiyawan, S.H. sebagai *Lead Asessor* dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Hj. Farah Umita, S.H. (Pendamping Asessor) dan Arpita Fitriyanti, S.H. (Pendamping Asessor), berdasarkan surat tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 493/DjA.3/ST/11/2020 tanggal 6 November 2020 dan surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor W6-A/1681/OT.01.3/XI/2020 tanggal 9 November 2020 telah selesai melaksanakan observasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Muara Enim yang merupakan bagian dari penilaian *asesment surveillance* kedua.

Berdasarkan hasil rapat komite keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020, Pengadilan Agama Muara Enim berhasil mempertahankan predikat **A (Excellent)**, sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020.

Gambar Lampiran Surat Dirjen Badilag Atas Assessment Surveillance APM Tahun 2020

Lampiran Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama/
Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Agama MA RI
Nomor: 3955/DjA.3/HM.00/11/2020
Tanggal: 30 November 2020

**PENETAPAN HASIL ASSESSMENT SURVEILLANCE
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2020**

NO.	UNIT KERJA	KELAS	PREDIKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
VI	PTA PALEMBANG	-	A (Excellent)	TETAP
1	PA PALEMBANG	IA	A (Excellent)	TETAP
2	PA BATURAJA	IB	A (Excellent)	TETAP
3	PA KAYU AGUNG	IB	A (Excellent)	TETAP
4	PA LAHAT	IB	A (Excellent)	TETAP
5	PA LUBUK LINGGAU	IB	A (Excellent)	TETAP
6	PA MUARA ENIM	IB	A (Excellent)	TETAP
7	PA MARTAPURA (p)	II	A (Excellent)	NAIK
8	PA MUARADUA	II	A (Excellent)	NAIK
9	PA PAGAR ALAM	II	A (Excellent)	TETAP
10	PA PANGKALAN BALAI	II	A (Excellent)	TETAP
11	PA PRABUMULIH	II	A (Excellent)	NAIK
12	PA SEKAYU	II	A (Excellent)	TETAP

Pada *audit surveillance* ketiga Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2021, Kamis 11 November 2021 Tim Asesmen Eksternal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Siti Yanuarina Marhamah, S.H., M.H sebagai *Lead Asessor* dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H (Pendamping Asessor) dan Arpita Fitriyanti, S.H. (Pendamping Asessor), berdasarkan surat tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3476/DjA/OT.00/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021 dan surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor W6-A/1971/OT.01.1/XI/2021 tanggal 4 November 2021 telah selesai melaksanakan observasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Muara Enim yang merupakan bagian dari penilaian *asesment surveillance* ketiga.

Berdasarkan hasil rapat komite keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2021, Pengadilan Agama Muara Enim berhasil mempertahankan predikat **A** (Excellent)** dengan rentang nilai 80.00-89.99, sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 531/DjA.3/HM.00/2/2022 tanggal 9 Februari 2022.

Gambar Lampiran Surat Dirjen Badilag Atas Assessment Surveillance APM Tahun 2021

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 531/DjA.3/HM.00/2/2022
Tanggal : 09 Februari 2022

PENETAPAN HASIL ASSESSMENT
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2021

NO	SATUAN KERJA	KELAS	TAHAPAN ASESMEN	PREDIKAT
VI	PTA PALEMBANG	-	Surveillance 3	A***
1	PA. BATURAJA	IB	Surveillance 3	A***
2	PA. KAYU AGUNG	IB	Penilaian Ulang/ Re-Akreditasi	A***
3	PA. LAHAT	IB	Surveillance 3	A**
4	PA. LUBUK LINGGAU	IB	Surveillance 3	A***
5	PA. MUARA ENIM	IB	Surveillance 3	A**
6	PA. PALEMBANG	IA	Penilaian Ulang/ Re-Akreditasi	A***
7	PA. SEKAYU	II	Surveillance 3	A**
8	PA. PANGKALAN BALAI	II	Surveillance 2	A***

Kemudian dalam menghadapi *audit surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2022, Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, Suspawati, S.Ag. telah membentuk Tim Penjaminan Mutu (TPM), berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor W6-A5/328/OT.01.3/IX/2022 tanggal 5 September 2022.

Tabel Susunan Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2022

NO	NAMA /NIP	JABATAN	
		DALAM INSTANSI	DALAM TIM AKREDITASI
1	2	3	4
1.	2	KETUA	TOP MANAJEMAN
2.	Gita Febrita, S.H.I., M.H	WAKIL KETUA	KETUA TIM PENJAMINAN MUTU
3.	Drs. Efendi	PANITERA	SEKRETARIS
4.	Hendri Suryana, S.Ag	SEKRETARIS	
5.	Sabariah , S.Ag, M.H	HAKIM	ASESSOR INTERNAL
6.	Yeni Kurniati, S.H.I	HAKIM	
7.	Weri Siswanto Bad, S.H.I	HAKIM	
8.	Firdaus,S.H.I	PANMUD HUKUM	TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
9.	Azhari, S.H., M.S.i	PANMUD PERMOHONAN	
10.	Maryam	PANITERA PENGGANTI	
11.	Fanani	JURUSITA	
12.	Suprayogi Pamungkas, S.H	JURUSITA	
13.	Adila Shabrina, S.H	CPNS	
14.	Nadia Romadhon, S.H	CPNS	
15.	Septa Tri Sanjaya, S.H	CPNS	
16.	Hayati Gustini, A.Md	CPNS	
17.	Sulastri, A.Md	CPNS	
18.	Rusia, A.Md	CPNS	
19.	Edy Irawan	HONORER	
20.	Padri Susanto	HONORER	
21.	Taufik Hidayat	HONORER	
22.	Rumli	HONORER	
23.	Nopriansyah, S.Kom	HONORER	

24.	Endah Rosmala Dewi, S.Si	KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	PENGENDALI DOKUMEN
25.	Yessi Puspitasari, A.Md	JURUSITA PENGGANTI	
26.	Yeni Puspita, S.Ag	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
27.	Firdaus,S.H.I.	PANMUD HUKUM	
28..	Rendy A, S.H.I.	PANMUD GUGATAN	
29.	Luthfi Hadisaputra, S.H.	PANITERA PENGGANTI	
30.	Rahmi Oktaria, S.H.I.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
31.	Kaim Nahrudin, S.H.	JURUSITA	
32.	Ary Puspita Yudha, S.T.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
33.	Novita Anggraini, S.Si.	STAF PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN	
34.	Sarita Fitri Moniko, S.IP.	CPNS	
35.	Arjuni, S.H.	Honoror	
36.	Diana Caesarianti, A.Md.	Honoror	
37.	Ari Cahyadi	Honoror	
38.	Selva Komalasari	Honoror	

Bagan Struktur Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2022

PENUNJUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB TAHUN 2022



Untuk Tahun 2022 telusur dokumen penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) telah diunggah Pengadilan Agama Muara Enim pada aplikasi PMPAPMZI sesuai surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 3862/DJA/HM.00/9/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2022. Namun pada pelaksanaannya Kegiatan Asessmen APM Tahun 2022 mengalami perubahan sesuai surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 4095/DjA.3/HM.00/9/2022 tanggal 5 Oktober 2022 bahwa pelaksanaan Asessmen Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022 melalui telusur dokumen dan observasi implementasi dinyatakan tidak diperlukan lagi.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penempatan dan Desain PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/ pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim terletak di sisi sudut kanan belakang gedung kantor. Pintu masuknya jadi satu kesatuan dengan pintu masuk ke ruang tunggu sidang. Para pihak berperkara dapat mengikuti petunjuk arah untuk menuju ke ruang tersebut.

Ruang PTSP Pengadilan Agama Muara Enim berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 m² x 6 m², dilengkapi tulisan “Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim” di tengah dinding partisi, dan pada setiap lokat layanan dilengkapi papan keterangan jenis layanan yang terletak di bagian atas.

Gambar Desain Ruang PTSP Pengadilan Agama Muara Enim



PTSP dibentuk dan dioperasikan dengan tujuan mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan; dan menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya.

PTSP di Pengadilan Agama Muara Enim diselenggarakan oleh Tim Pengelola PTSP yang terdiri atas pengarah PTSP yang dijabat oleh Ketua Pengadilan, Penanggungjawab PTSP yang dijabat oleh Panitera dan Sekretaris, Pelaksana PTSP yang dijabat oleh seluruh Panitera Muda dan Kepala Subbagian, dan Petugas PTSP yang dijabat oleh pegawai-pegawai yang dinilai cakap dan mampu.

Fasilitas PTSP

Fasilitas Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Muara Enim antara lain :

Tabel Daftar Fasilitas PTSP

Nama Fasilitas PTSP	Jumlah	Kondisi	Keterangan
Meja Panjang Terintegrasi	1	Baik	Sesuai jumlah petugas PTSP

Kursi Petugas	7	Baik	Sesuai jumlah petugas PTSP
Kursi Hadap	7	Baik	Sesuai jumlah pengguna layanan PTSP
Kursi Tunggu	4	Baik	Untuk pengguna layanan PTSP menunggu antrian
Komputer	6	Baik	Sesuai jumlah petugas PTSP
Printer	2	Baik	Terdapat pada Petugas Kasir dan Produk Pengadilan
Brosur Daftar Panjar Biaya	1	Baik	Tersedia brosur yang dicetak warna serta dapat diambil oleh pengguna layanan PTSP
Brosur Syarat-Syarat Perkara	1	Baik	Tersedia brosur yang dicetak warna serta dapat diambil oleh pengguna layanan PTSP
Brosur Permohonan Informasi dan Pengaduan	1	Baik	Tersedia brosur yang dicetak warna serta dapat diambil oleh pengguna layanan PTSP
Telepon	1	Baik	Telepon saluran internal dan eksternal (PABX) yang difungsikan
Alat Tulis	6	Baik	Alat tulis yang tersedia sesuai jumlah petugas PTSP dan dipergunakan
Buku Register/Jurnal	3	Baik	Tersedia Register dan Jurnal yang digunakan
Kotak Saran	1	Baik	Kotak saran sebagai survei layanan harian
Papan Nama Petugas	5	Baik	Tersedia papan nama petugas PTSP yang disertai foto dan identitas
Papan Jam Layanan	1	Baik	Tersedia papan jam layanan petugas PTSP
Papan Jam Istirahat	1	Baik	Tersedia papan jam istirahat petugas PTSP

Sarana Penunjang PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan sudah didukung oleh sarana penunjang yang cukup memadai, diantaranya mesin antrian pengunjung, TV Media Center dan CCTV. Untuk mengoptimalkan kinerja PTSP, Pengadilan Agama Muara Enim memanfaatkan aplikasi-aplikasi di bidang administrasi perkara (SIPP, E-Court, Gugatan Mandiri) dan administrasi umum yang disediakan Mahkamah Agung dan/atau dikembangkan oleh Pengadilan.

Layanan Pokok PTSP

Terdapat 6 (enam) jenis layanan pokok pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim, yakni layanan permohonan informasi, layanan pendaftaran perkara, layanan e-court, layanan pembayaran biaya (kasir), layanan penyerahan produk pengadilan, dan layanan pengajuan keluhan/ pengaduan, dimana setiap loket layanan tersebut akan melayani sesuai jenis layanan masing-masing.

Layanan permohonan informasi meliputi :

1. Permohonan informasi biasa.
2. Permohonan informasi khusus.

Layanan e-court meliputi :

1. Pembuatan akun pengguna non advokat (perorangan, pemerintah, badan hukum, kuasa insidentil).
2. Aktivasi akun pengguna non advokat (perorangan, pemerintah, badan hukum, kuasa insidentil).
3. Validasi pendaftaran perkara e-court (gugatan online, gugatan sederhana online, permohonan online).
4. Pembuatan virtual account (e-payment).
5. Panggilan elektronik (e-summons).

Layanan pendaftaran perkara meliputi :

1. Pendaftaran perkara gugatan/ permohonan tingkat pertama.
2. Pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.
3. Pendaftaran pemeriksaan setempat (Descente).
4. Pendaftaran permohonan konsinyasi.
5. Pendaftaran sita jaminan.
6. Pendaftaran permohonan eksekusi.
7. Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Layanan layanan pembayaran biaya meliputi :

1. Penaksiran panjar biaya perkara.
2. Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar.
3. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Pengembalian sisa panjar biaya perkara.
5. Penyerahan bukti-bukti pembayaran.
6. Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Layanan penyerahan produk pengadilan meliputi :

1. Salinan putusan/penetapan.
2. Akta cerai.
3. Dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Layanan penyerahan produk pengadilan meliputi :

1. Pelanggaran KEPPH.
2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan.
3. Pelanggaran sumpah jabatan.
4. Pelanggaran peraturan disiplin pegawai.
5. Perbuatan tercela.
6. Pelanggaran hukum acara.
7. Mal administrasi.
8. Pelayanan publik.

Layanan Pendukung PTSP

Terdapat 2 (Dua) jenis layanan pendukung pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim, yakni pemberian bantuan hukum (Posbakum) dan pembelian meterai dan legalisir (PT. Pos).

Pada Tahun 2022 layanan penyeteran panjar biaya perkara dilakukan dengan cara di ambil oleh petugas Bank BSI pada setiap pukul 15.00 WIB untuk selanjutnya di setor ke rekening perkara Pengadilan Agama Muara Enim.

Prosedur Layanan PTSP

Waktu operasional layanan PTSP sesuai dengan jam operasional kantor dan seluruh layanan dalam PTSP diberikan sesuai dengan prosedur baku . (*Standard Operating Procedure*) setiap jenis layanan pada PTSP. Untuk jam istirahat Petugas PTSP ditiadakan, diberlakukan sistem shift pada jam istirahat guna memberikan pelayanan yang prima bagi para pihak kapanpun mereka datang selama masih jam kerja mereka akan tetap dilayani. Hal ini merupakan salah satu wujud aksi dari salah satu agen perubahan Pengadilan Muara Enim Tahun 2022.

JAM LAYANAN PTSP	
SENIN - KAMIS	JUM'AT
08.00 - 16.30 WIB	07.30 - 16.30 WIB

Performa Petugas PTSP

Petugas PTSP Pengadilan Agama Muara Enim sedemian rupa dapat memahami kedudukan, struktur organisasi dan kompetensi Pengadilan, memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai Petugas PTSP, terampil mengoperasikan komputer, memahami prinsip-prinsip pelayanan Pengadilan yang prima, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan bekerja sama dalam Tim. Dalam meningkatkan kompetensi Petugas PTSP, Ketua Pengadilan telah mengupayakan Petugas PTSP untuk mengikuti pelatihan pelayanan prima "Service Excellent" yang dilakukan oleh trainer dari BRI dan menetakannya sebagai salah satu program kerja.

Gambar Petugas PTSP Mengikuti Bimbingan Pemberian Layanan



3. Inovasi Pelayanan Publik

Pengadilan Agama Muara Enim telah melaporkan beberapa inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Kinsatker.

Inovasi Antrian PTSP

Antrian PTSP merupakan aplikasi antrian bagi pengunjung yang hendak berurusan di ruang pelayanan terpadu satu pintu. Aplikasi ini berbasis web yang dijalankan pada sebuah server lokal dalam satu jaringan *local area network* (LAN). Dalam mengimplementasikan inovasi ini, dibutuhkan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan pengguna (*brainware*).

Kebutuhan perangkat keras untuk mengimplementasikan inovasi pelayanan publik berupa aplikasi antrian PTSP ini terdiri dari beberapa perangkat, yaitu :

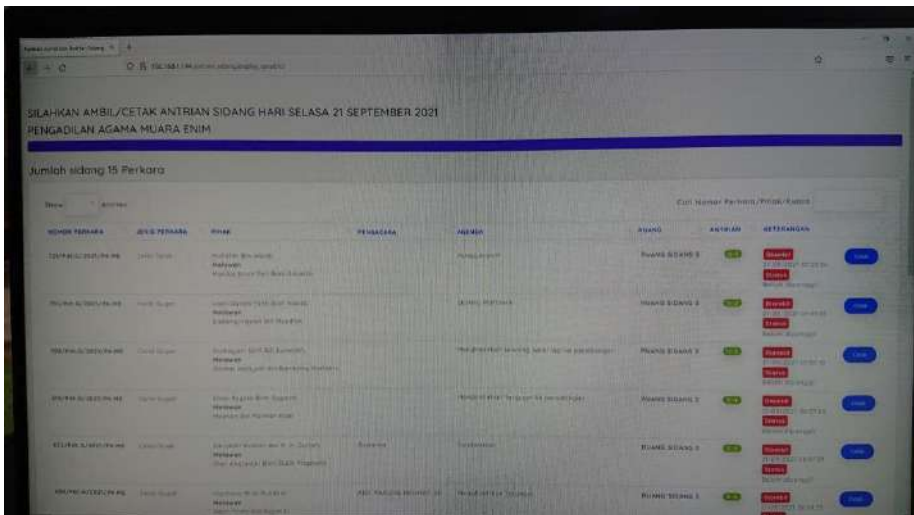
Tabel Kebutuhan Perangkat Keras untuk Aplikasi Antrian PTSP

Nama Perangkat	Jumlah	Spesifikasi Minimum	Uraian Keperluan
Kios Touch Screen	1 Unit	OS Android, Layar Sentuh, LAN/Wifi, Speaker	Digunakan untuk mengambil nomor antrian pengunjung
All In One PC Desktop	4 Unit	OS Windows 10 64 Bit, DDR4 4GB, 500GB Hardisk, LAN/Wifi	Digunakan untuk petugas meja loket : 1. Informasi 2. Pendaftaran 3. Kasir 4. Produk Pengadilan
TV Led	1 Unit	Layar 32 Inchi, HDMI, Speaker	Digunakan untuk menampilkan nomor antrian yang sedang di panggil ke meja loket, dan sekaligus mengeluarkan suara pemanggilan nomor antrian
Printer Thermal	1 Unit	Support Windows, USB Port, Ukuran Kerta 58 mm	Digunakan untuk mencetak nomor antrian yang diambil oleh pengunjung

Gambar Tampilan Utama Aplikasi Antrian Sidang dan PTSP



Gambar Tampilan Locket Ambil Antrian Aplikasi Antrian Sidang

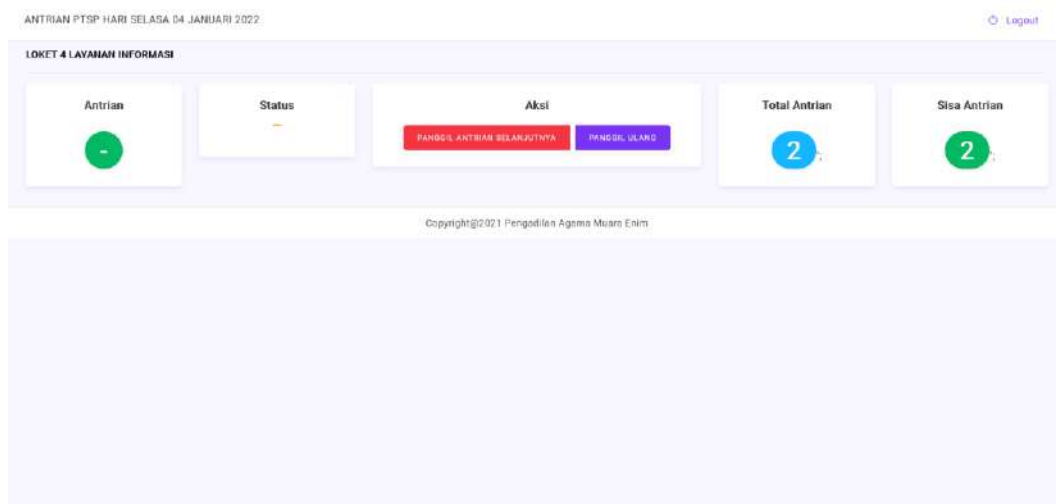


Gambar Tampilan Loker Ambil Antrian Aplikasi Antrian PTSP



Copyright©2021 Pengadilan Agama Muara Enim

Gambar Tampilan Meja Loker Aplikasi Antrian PTSP



Copyright©2021 Pengadilan Agama Muara Enim

Inovasi pelayanan publik antrian PTSP ini dibuat dan dikembangkan sendiri oleh Pengadilan Agama Muara Enim. Penyelesaian pekerjaan pembuatan aplikasi ini yaitu pada tanggal 3 September 2019 dan telah diimplementasikan secara utuh pada awal Januari 2020, kemudian sampai sekarang aplikasi antrian PTSP ini masih berjalan dengan baik

dan dapat digunakan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Muara Enim. Aplikasi ini dinilai sangat bermanfaat dalam menertibkan pelayanan informasi, pendaftaran, kasir, dan produk pengadilan di ruang PTSP.

Gambar Para Pihak Mengambil Antrian Layanan PTSP



Inovasi ASIVA (Asisten Virtual)

ASIVA adalah layanan digital berbasis chat Asisten Virtual (ASIVA) Pengadilan Agama Muara Enim via WhatsApp. ASIVA diluncurkan dan diimplementasikan pada bulan 24 Juni 2021. ASIVA hadir untuk memudahkan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan kepada masyarakat. Informasi yang diberikan melalui ASIVA (Asisten Virtual) ini berupa :

1. Informasi Penanganan Perkara yang terdiri dari :
 - a. Info keuangan perkara;
 - b. Info status putus perkara;
 - c. Info jadwal sidang perkara;
 - d. Info penerbitan akta cerai;
 - e. Info secara lengkap data perkara;

2. Informasi Prosedur Berperkara yang terdiri dari :
 - a. Syarat mengajukan perkara;
 - b. Biaya panjar perkara di pengadilan;
 - c. Besaran biaya radius panggilan;
 - d. Besaran biaya PNBP panggilan;
 - e. Info pengembalian sisa panjar;
 - f. Info sisa panjar ke pihak;
 - g. Info brosur-brosur layanan;
 - h. Info prosedur e-court;
 - i. Info gugatan sederhana;
 - j. Info pembuatan gugatan mandiri;
 - k. Info layanan posbakum;
 - l. Info layanan perkara prodeo;
 - m. Info layanan sidang keliling;
 - n. Pengambilan formulir permohonan informasi di pengadilan;
 - o. Penyampaian pengaduan
3. Akses Informasi Lainnya :
 - a. Alamat kantor;
 - b. Daftar kontak;
 - c. Daftar sosial media;
 - d. Laporan realisasi anggaran;
 - e. Daftar pegawai;
 - f. Struktur organisasi;
 - g. Jam kerja pelayanan;
 - h. Laporan pelaksanaan kegiatan;
 - i. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Gambar Tampilan ASIVA via WhatsApp



Inovasi SIKUMU (Sistem Buku Tamu)

Sistem Buku Tamu (SIKUMU) adalah Sistem Informasi Buku Tamu dengan Scan Barcode Berbasis Web di Pengadilan Agama Muara Enim yang dibuat khusus untuk tamu umum di pintu bagian depan kantor (resepsionis) selain dari tamu pada bagian perkara. SIKUMU dibuat karena pada pelayanan bagian tamu pada resepsionis masih secara manual yang mengakibatkan rentan terjadinya penularan virus covid-19 melalui interaksi langsung maupun secara tidak langsung, serta menjadikan penyimpanan data lebih efektif dan efisien karena data akan tersimpan pada database server dan akan mengurangi penggunaan kertas. Aplikasi ini di launching pada tanggal 22 Juni 2021.

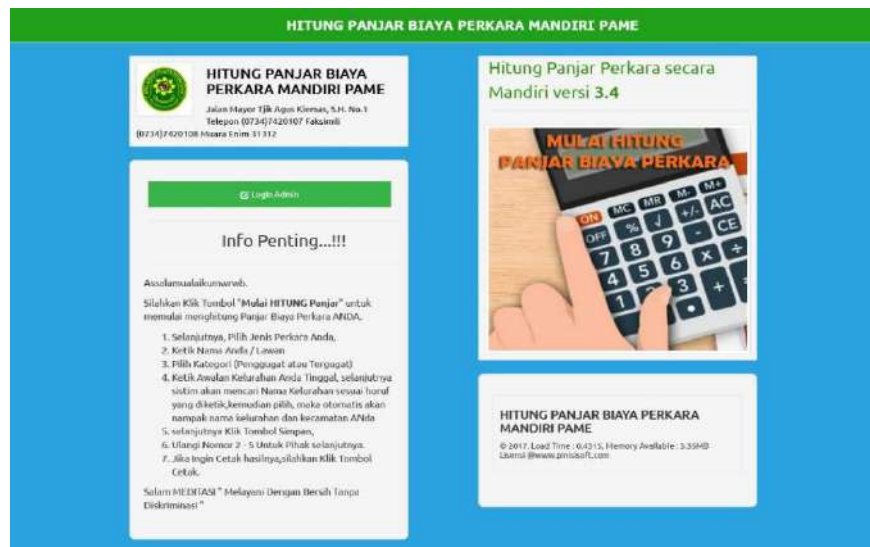
Gambar Tampilan SIKUMU



Inovasi IJAB (Hitung Panjar Biaya)

IJAB adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk menghitung perkiraan panjar biaya perkara berdasarkan radius tempat tinggal pihak yang berperkara sesuai dengan data KOMDANAS yang telah di input oleh Pengadilan Agama, yang mana dalam aplikasi ini akan ditampilkan biaya panjar yang harus dibayarkan oleh pihak yang berperkara secara rinci dan jelas. Dalam menghitung panjar biaya perkara, aplikasi ini akan menanyakan dimana tempat tinggal pemohon/penggugat dan dimana tempat tinggal termohon/tergugat. Setelah itu barulah aplikasi menghitung dan menampilkan biaya panjar yang harus dibayar.

Gambar Tampilan Aplikasi IJAB



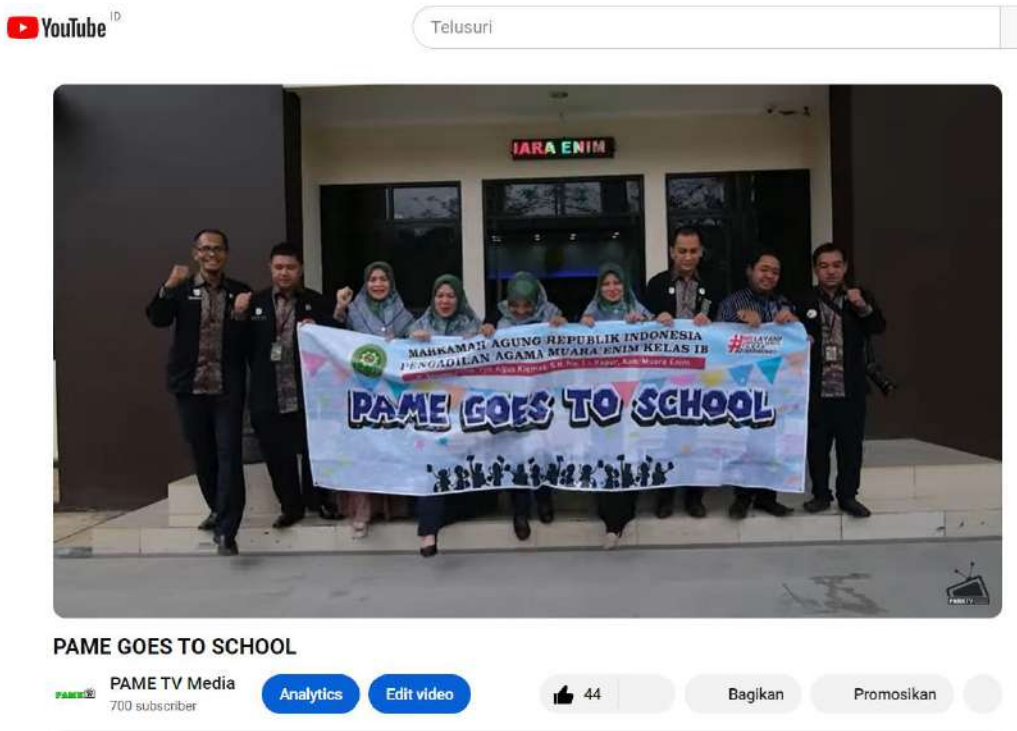
Inovasi PERANTI : Pelayanan pRima tANpa henTI

Masih banyak masyarakat yang berurusan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB pada saat Jam Istirahat, masih terlihat masyarakat pencari keadilan menunggu di Ruang Tunggu Terbuka, dengan adanya inovasi PERANTI : Pelayanan pRima tANpa henTI Yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa berhenti saat jam istirahat, maksudnya disaat Jam Istirahat masyarakat tetap dapat dilayani, dan itu salah satu service excellent kepada masyarakat.

Inovasi PAME Goes To School

PAME Goes to school merupakan sebuah inovasi yang dibuat dengan memberikan edukasi kepada para pelajar khususnya anak-anak SMA / SMK mengenai pernikahan dini. Tujuan dari pemberian edukasi pernikahan dini kepada para siswa/siswi adalah untuk menekan pernikahan di bawah umur di kabupaten Muara Enim, serta mendorong dan memotivasi para siswa untuk mendahulukan pendidikan untuk masa depannya.

Gambar Inovasi PAME Goes To School



Selain dari inovasi pelayanan publik yang dikembangkan sendiri, Pengadilan Agama Muara Enim juga mengimplementasikan 26 (dua puluh enam) Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok, sebagaimana Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 044/DjA/HK.00/SK/1/2023, tanggal 9 Januari 2023 tentang **Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2023**.

26 (Dua puluh enam) Inovasi Dirjen Badilag

Terhadap Dua puluh enam Inovasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Enim telah mengimplementasikannya dengan baik. Berikut ini gambaran hasil implementasi pelaksanaannya :

Gambar Program Prioritas Ditjen Badilag MA RI

 **PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB**



**26 INOVASI DITJEN
BADILAG MA RI**
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H
Ditjen Badilag MA RI

BERIKUT 26 INOVASI DITJEN BADILAG : 

1. APLIKASI PUSAT ADATA PERKARA
2. APLIKASI E- LAPORAN
3. APLIKASI PTSP ONLINE SATKER TINGKAT BANDING
4. APLIKASI HUKUM EKONOMI SYARIAH BADILAG
5. APLIKASI ANTRIAN SIDANG
6. BASIS DATA TERPADU KEMISKINAN
7. APLIKASI PNPB FUNGSIONAL
8. E-EKSAMINASI
9. E-REGISTER PERKARA
10. E-REGISTER KEUANGAN PERKARA
11. COMMAN CENTER
12. APLIKASI VALIDASI AKTA CERAI
13. APLIKASI GUGATAN MANDIRI
14. PORTAL APLIKASI SIMTALAK (TNDE, SIPP, ABS, E-LEARNING, BIAYA MUTASI, PNPB, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA)
15. APLIKASI IJIN CUTI
16. APLIKASI IJIN KELUAR NEGERI
17. APLIKASI TIDAK MASUK KANTOR
18. APLIKASI IJIN BELAJAR
19. APLIKASI IJIN SIDANG HAKIM TUNGGAL
20. APLIKASI IJIN PENCANTUMAN GELAR
21. APLIKASI SKM DITJEN BADILAG
22. APLIKASI BUKU TAMU DIGITAL
23. PELAYANAN FIT & PROPER TES ONLINE
24. PENILAIAN KINERJA SATKER
25. PORTAL EKONOMI SYARIAH
26. APLIKASI VISION+

BerAKHLAK  bangga melayani 



1. Aplikasi Antrian Sidang

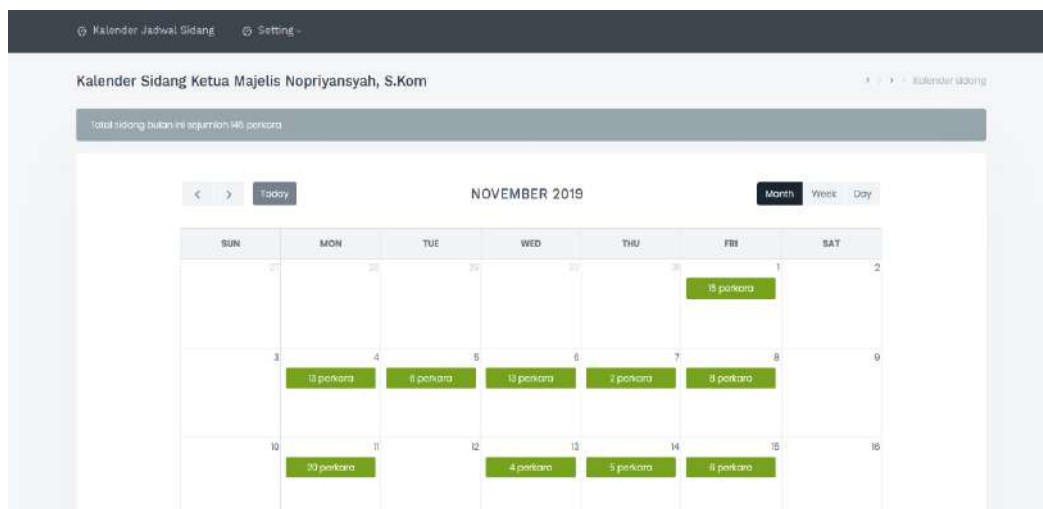
Pengadilan Agama adalah salah satu pengadilan yang menangani perkara dengan volume yang sangat tinggi/overload, mengingat banyaknya jumlah perkara yang disidangkan setiap harinya, khususnya di pulau jawa.

Selain itu, terbatasnya jumlah hakim dan jumlah ruang sidang mengakibatkan persidangan harus dilakukan secara bergantian, yang pada akhirnya mengakibatkan masa tunggu untuk mengikuti sidang menjadi cukup lama.

Sudah lazim diketahui, sebaran jumlah perkara di berbagai wilayah sangatlah variatif, ini sangat tergantung kepada padatnya jumlah penduduk dan jumlah penduduk muslim yang ada di suatu daerah.

Aplikasi Antrian sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan pembagian jadwal persidangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengatur waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan.

Gambar Tampilan Aplikasi Antrian Sidang online



Fungsi Aplikasi :

1. Menyediakan pendaftaran antrean secara online.
2. Memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sesuai dengan kebutuhannya.

2. E-Register Keuangan Perkara

Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara

efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

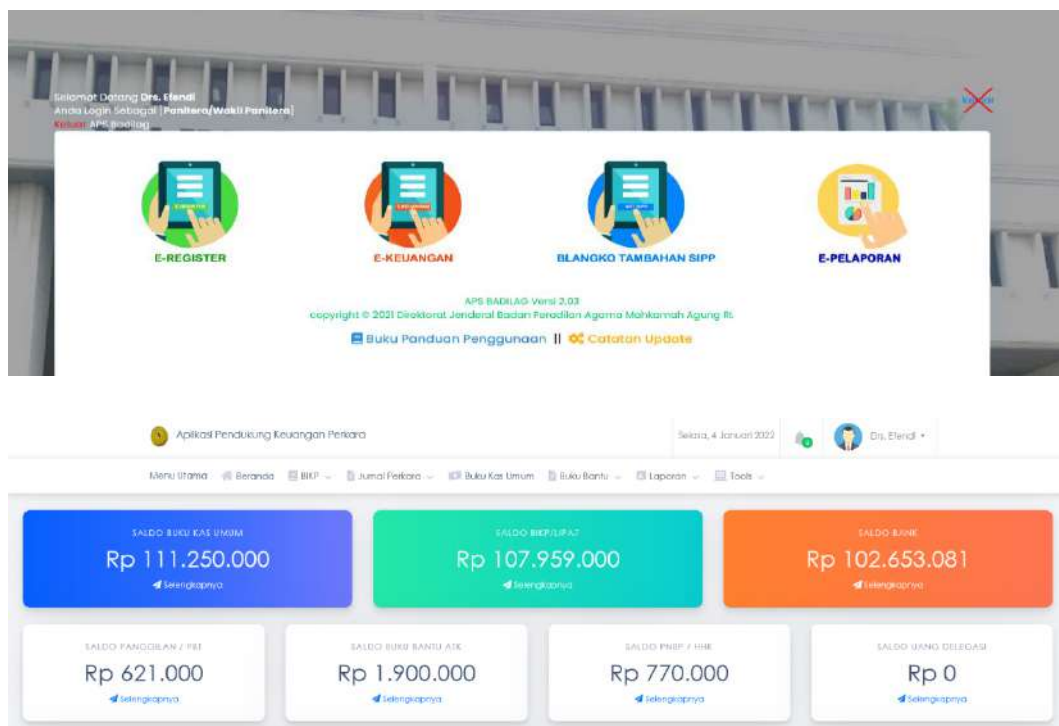
Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II). Aplikasi ini digunakan untuk memonitor dan mencetak laporan keuangan perkara meliputi:

- a. Buku Jurnal Perkara Gugatan (KI-PA1/G)
- b. Buku jurnal perkara permohonan (KI-PA1/P)
- c. Buku jurnal permohonan banding (KI-PA2)
- d. Buku jurnal permohonan kasasi (KI-PA3)
- e. Buku jurnal permohonan peninjauan kembali (KI-PA4)
- f. Buku jurnal permohonan eksekusi (KI-PA5)
- g. Buku induk keuangan perkara (KI-PA6)
- h. Buku keuangan biaya eksekusi (KI-PA7)
- i. Buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan (KI-PA8a)
- j. Buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan lainnya (KI-PA8b)

Hasil cetak buku induk keuangan perkara pada aplikasi ini, dibagi menjadi tiga versi, meliputi:

- a. Versi bindalmin, yaitu hasil cetaknya sama persis Buku Induk Keuangan Perkara pada umumnya.
- b. Versi ringkas, di mana kolom-kolom dalam Buku Induk Keuangan Perkara lebih ringkas menyesuaikan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara.
- c. Versi rekap, yaitu hasilnya dikelompokkan berdasarkan nomor perkara Penerapan aplikasi keuangan perkara di lingkungan peradilan agama diatur dalam Surat Dirjen Badilag Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019, tanggal 11 Februari 2019, hal Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Peradilan Agama dan Surat Dirjen Badilag Nomor 0956/DJA/HM.02.3/III/2019, tanggal 18 Maret 2019 hal Penggunaan Aplikasi Pendukung SIPP untuk memonitor dan mencetak laporan keuangan perkara.

Gambar Tampilan Aplikasi E-Keuangan



Fungsi Aplikasi

1. Sebagai salah satu sarana validasi data keuangan perkara.
2. Sebagai sarana pencetakan buku-buku keuangan perkara.
3. Sebagai sarana melakukan pelaporan keuangan perkara.
4. Sebagai sarana melakukan pelaporan keuangan perkara.

3. Basis Data Terpadu Kemiskinan

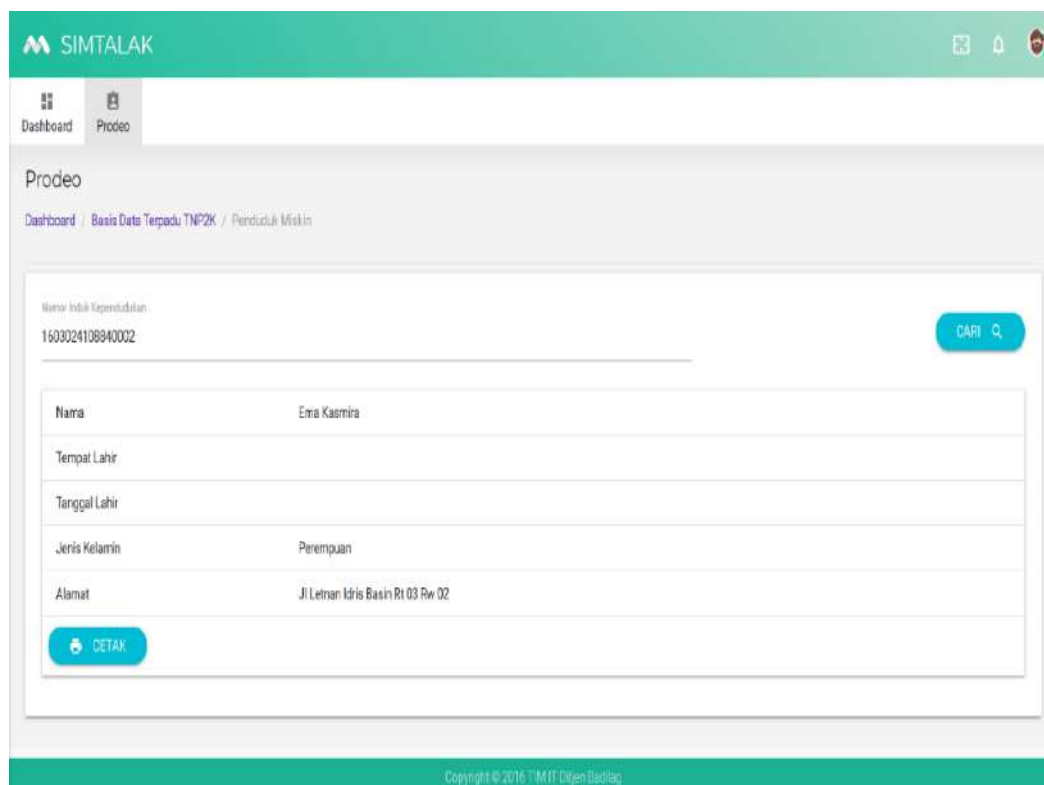
PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan mengatur tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Pembebasan Biaya Perkara; Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pos Pelayanan Hukum di Pengadilan. Pembebasan biaya perkara artinya para pencari keadilan yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma melalui anggaran DIPA yang diberikan oleh negara.

Kemudahan yang diberikan Perma 1/2014 ternyata menyisakan sedikit persoalan dalam pelaksanaannya. Pembebasan biaya perkara yang

sudah dianggarkan pada suatu pengadilan tidak terserap dengan baik, disebabkan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dari kelurahan atau surat sejenisnya yang diperlukan, bahkan untuk pembuatan surat tersebut seringkali membutuhkan lebih banyak waktu dan juga biaya.

Ditjen Badilag telah membuat aplikasi verifikasi data kemiskinan, aplikasi ini nantinya dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan, pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya.

Gambar Tampilan Aplikasi Data Kemiskinan



The screenshot shows the SIMTALAK application interface. At the top, there is a green header with the SIMTALAK logo and navigation icons. Below the header, there are tabs for 'Dashboard' and 'Prodeo'. The main content area is titled 'Prodeo' and contains a search bar with the text 'Nomor Induk Kependudukan' and the value '1603024108940002'. A 'CARI' button is next to the search bar. Below the search bar, there is a table with the following data:

Nama	Enna Kasmira
Tempat Lahir	
Tanggal Lahir	
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat	Jl Letnan Idris Basri Rt 03 Rw 02

At the bottom of the table, there is a 'CETAK' button. The footer of the application shows 'Copyright © 2016 TIM IT Ditjen Badilag'.

Gambar Tampilan Hasil Cetak Aplikasi Data Kemiskinan

DATA PENDUDUK MISKIN BASIS DATA TERPADU TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)	
NIK	1603024108840002
Nama	Ema Kasmira
Tempat / Tanggal Lahir	/
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat	Jl Letnan Idris Basin Rt 03 Rw 02
Nomor Kartu Program Keluarga Harapan	
Nomor Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/ Kartu Perlindungan Sosial (KPS)	
Nomor Kartu Penerima Bantuan Iuran BPJS	

Data tersebut di atas dicetak melalui Aplikasi Basis Data Terpadu Daftar Penduduk Miskin pada Ditjen Badan Peradilan Agama di laman <https://simtalak.badilag.net> bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk kepentingan beracara secara prodeo pada Pengadilan Agama Muara Enim.

Dicetak di _____
Pada tanggal 16 Oktober 2019
Petugas Cetak

(_____)
NIP. _____

4. Aplikasi Informasi Produk dan Perkara

Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, mungkin fungsinya seperti website yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih aktif dan personal kepada pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar.

Aplikasi ini merupakan suatu aplikasi yang terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan.

Gambar Tampilan Aplikasi Informasi dan Produk Perkara

The screenshot displays the 'A.C.O. Integrated System' interface. It features a header with a menu icon and the system name. Below the header, there are two main sections: 'Data Utama' and 'Rekening Perkara'.

Data Utama

Nomor Perkara	1059/Pdt.G/2019/PA.ME
Jenis Perkara	Cerai Gugat
Tanggal Pendaftaran	20 November 2019
Penggugat	Handi Pusta Sari binti Hamudlin Jalan Pertamina, Desa Babit, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
Tergugat	Firmansyah bin H.Amin Dusun I, Desa Purun, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Rekening Perkara

Tanggal	Uraian	Kredit	Debet	Saldo
20 November 2019	Panjar Biaya Perkara	1171000	0	1171000
20 November 2019	Biaya Pendaftaran/PMBP	0	50000	1141000
20 November 2019	Biaya Pemberkas/PNK	0	50000	1091000
Jumlah		1171000	80000	1091000

Fungsi Aplikasi : Memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak.

5. Aplikasi Notifikasi Perkara

Pengadilan adalah lembaga yang terbuka untuk semua kalangan, namun seringkali masyarakat yang datang ke pengadilan adalah masyarakat awam yang baru pertama kali datang ke pengadilan, jangankan mengerti persoalan hukum, persoalan administrasi di pengadilan pun terkadang membuat bingung. Bagaimana proses yang harus dijalani, apa yang harus disiapkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara.

Proses berperkara di persidangan memang harus melewati tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan, dari tahapan administrasi sampai tahapan persidangan. Para pihak sering kali bingung atau mungkin tidak tahu apa yang mesti dilakukan setelah melewati satu proses, sehingga

dibutuhkan satu cara atau terobosan untuk bisa mengingatkan para pihak bahwa proses perkara yang dijalaninya sudah sampai tahapan apa. Hal ini akan memudahkan pihak yang berperkara untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik.

Aplikasi notifikasi perkara ini merupakan hal sederhana yang bisa diterapkan secara nasional, meskipun bukan sesuatu yang sama sekali baru, karena di beberapa pengadilan juga sudah menerapkannya, namun untuk diterapkan secara menyeluruh di semua pengadilan agama tingkat pertama belum pernah dilakukan. Inilah yang mendorong Ditjen Badilag untuk mengembangkan sistem aplikasi ini.

Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal dalam suatu perkara maupun Kuasa Hukumnya.

Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersumber dari data kependudukan dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara.

Gambar Tampilan Balasan Notifikasi SMS



Gambar Banner / Brosur SMS Notifikasi Perkara



Fungsi Aplikasi :

1. Memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara.
2. Bersifat aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu).

6. E-Register Perkara

Bahwa yang dimaksud dengan e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Ketua Pengadilan bertanggung jawab penuh dalam melakukan monitoring dan evaluasi setiap hari kerja, paling lambat satu jam sebelum jam kerja berakhir guna memastikan seluruh data perkara dan data keuangan perkara pada hari tersebut telah diinput ke dalam aplikasi SIPP secara tepat dan benar.

Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal.

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama membangun aplikasi e-Register yang dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja

Gambar Tampilan Cetak Register pada Aplikasi E-Register

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Jenis Perkara	Para Pihak	Tahapan	Status Perkara	Aksi
1	30/Pdt.G/2022/PA.ME	04 Januari 2022	Ceset Gugat	Penggugat: Rohayu binti Santosa Tergugat: Patta Dama bin Aman Darwandi	Penetapan	Penunjukan Juratla	[Detail]
2	29/Pdt.G/2022/PA.ME	04 Januari 2022	Ceset Gugat	Penggugat: Sukarti binti Suwaji Tergugat: Tidihan bin Robinson	Penetapan	Penunjukan Juratla	[Detail]
3	28/Pdt.G/2022/PA.ME	04 Januari 2022	Ceset Gugat	Penggugat: Ima Baidi Miliari binti Mislan Tergugat: Ransap Fandiha bin Pandanan	Penetapan	Penunjukan Juratla	[Detail]
4	27/Pdt.G/2022/PA.ME	04 Januari 2022	Ceset Gugat	Pengugat: Indah Yuniarti binti Sukirman Tergugat: Iri Agus Harvina bin Sudatnan	Penetapan	Penunjukan Juratla	[Detail]
5	26/Pdt.G/2022/PA.ME	04 Januari 2022	Ceset Talak	Pemohon: Gita Dyaningsih bin Abdul Raiyid Terdapat: Mustika Ratu binti Jon Karsidi	Penetapan	Sidang pertama	[Detail]
6	25/Pdt.G/2022/PA.ME	04 Januari 2022	Ceset Gugat	Pengugat: Mastida binti Kawan	Penetapan	Sidang pertama	[Detail]

Fungsi Aplikasi :

1. Sebagai salah satu sarana validasi data SIPP satuan kerja.
2. Sarana pencetakan buku-buku register sesuai pola bindalmin.

7. Aplikasi PNBP Fungsional

Ada persoalan yang beberapa Tahun belakangan belum bisa ditemukan solusinya. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBPN Fungsional Keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius.

Ditjen Badilag mengembangkan aplikasi yang diharapkan bisa mengatasi persoalan ini, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBPN Fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, Penyetoran PNBPN Fungsional tepat waktu dan lengkap, yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetor PNBPN Fungsional pada Tahun berjalan.

Gambar Tampilan Aplikasi PNBP Fungsional

The screenshot displays the 'BUKU PENERIMAAN HAK HAK KEPANITERAAN (PNBP)' interface. It includes a date filter set to '16/10/2019' and a 'Cetak' button. The main table lists transactions with the following columns: Tanggal, Bagian, No. Bukti, Biaya Pendaftaran (Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi), Pokok Gajian Kembali, Biaya Revisi, Jumlah, and Keterangan.

1	2	3	Biaya Pendaftaran				7	8	9	10
			4	5	6					
16 Oktober 2019	467/Pdt.G/2019/Pk.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	10.000,00,-		
16 Oktober 2019	874/Pdt.G/2019/Pk.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	20.000,00,-		
16 Oktober 2019	875/Pdt.G/2019/Pk.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	30.000,00,-		
16 Oktober 2019	881/Pdt.G/2019/Pk.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	40.000,00,-		
16 Oktober 2019	883/Pdt.G/2019/Pk.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	50.000,00,-		
16 Oktober 2019	885/Pdt.G/2019/Pk.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	60.000,00,-		
16 Oktober 2019	887/Pdt.G/2019/Pk.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	70.000,00,-		
16 Oktober 2019	888/Pdt.G/2019/Pk.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	80.000,00,-		

Fungsi Aplikasi

1. Pencatatan PNBP Fungsional secara lengkap, mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara.
2. Sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetorkan PNBP Fungsional ke Kas Negara pada Tahun berjalan.
3. Pengukuran kinerja kasir dan bendahara penerimaan.

8. E-Eksaminasi

Saat ini belum ada mekanisme untuk mengetahui kualitas putusan hakim, biasanya untuk mengetahui kualitas putusan hakim dalam jumlah banyak hanya bisa dilakukan dengan cara penelitian yang membutuhkan waktu lama, biaya yang banyak, dan hasilnya pun masih sangat terbatas. Dengan kuantitas satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia yang cukup besar (412 pengadilan tingkat pertama, 29 Satker tingkat banding) dengan banyaknya jumlah hakim menjadi tantangan tersendiri bagi Ditjen Badilag untuk memetakan kualitas putusan dan berkas perkara serta kemampuan teknis administrasi yustisial hakim peradilan agama di Indonesia.

Selama ini, terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim, karena ketidaktersediaan data kualitatif yang

seharusnya dapat dikuantitatifkan tersebut. Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan pengadilan dalam Direktori Putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Ditjen Badilag akan melakukan eksaminasi silang terhadap putusan hakim tingkat pertama, dimana putusan hakim tingkat pertama akan dieksaminasi oleh 3 (tiga) hakim tinggi yang bertugas di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda.

Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama melalui Direktori Putusan, kemudian setiap putusan akan dicek kelengkapan data perkaranya melalui aplikasi SIPP, kemudian dieksaminasi oleh tiga orang hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim, artinya hakim tingkat pertama yang dieksaminasi tidak mengetahui siapa yang melakukan eksaminasi, hal ini untuk menjaga objektivitas proses eksaminasi.

Aplikasi ini adalah sebuah sistem evaluasi dan penilaian secara elektronik terhadap penerapan hukum formil dan materiil oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. e-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan kebijakan, diklat, serta promosi dan mutasi.

Gambar Tampilan Aplikasi e-Eksaminasi

NO	PESERTA		EKSAMINATOR		STATUS	NOMOR PERKARA	NILAI	DETAIL
	MULAI	SELESAI	MULAI	SELESAI				
1.	6 September 2021	22 September 2021	23 September 2021	7 November 2021	Selesai	309/PTU.G/2021/PA.ME	-	

Fungsi Aplikasi

1. Untuk meningkatkan profesionalisme hakim, baik segi teknis yuridis maupun administrasi perkara.
2. Mendapatkan bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan hukum materiil dan formil oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara.
3. Mendorong Hakim untuk meningkatkan integritas, kredibilitas, dan profesionalisme dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
4. Mendapatkan bahan pemetaan kompetensi dan pemerataan komposisi Hakim di peradilan agama.
5. Mendapatkan bahan pembinaan yang lebih tepat sasaran guna penyusunan perencanaan peningkatan kompetensi Hakim dalam bentuk bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan.

9. Command Center

Untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan agama baik tingkat pertama maupun banding, Ditjen Badilag selalu membuat program kerja yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di pengadilan agama baik itu teknis yudisial maupun non teknis yudisial baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

Banyaknya jumlah satuan kerja dan jumlah pegawai di lingkungan peradilan agama menyebabkan kebutuhan tenaga dan biaya pembinaan menjadi besar, hal ini berimplikasi pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan bimbingan dan monitoring terhadap seluruh hakim dan aparat peradilan jika hal ini dilakukan dengan cara konvensional.

Perlu dicari cara agar koordinasi antara pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik, berbiaya murah, cakupan wilayah dan peserta yang lebih banyak, dan hasil yang lebih maksimal.

Command Center bukan merupakan hal yang baru, bahkan di beberapa negara maju penggunaannya adalah hal yang lazim. Namun pemanfaatannya untuk lembaga peradilan masih belum masif digunakan. Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan hal ini sebagai suatu terobosan yang patut untuk diaplikasikan secepatnya.

Ditjen Badilag sedang mengembangkan Command Center Badilag yang mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja.

Gambar Tampilan Aplikasi Command Center





Fungsi Aplikasi

1. Pusat kontrol data manajemen peradilan agama seluruh Indonesia, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus.
2. Pusat Pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan real time.
3. Pusat pengembangan E Learning.
4. Pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama.
5. Sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.

10. Aplikasi Validasi Akta Cerai

Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana verifikasi dan validasi Akta Cerai dengan cara menginput nomor seri dan nomor akta cerai.

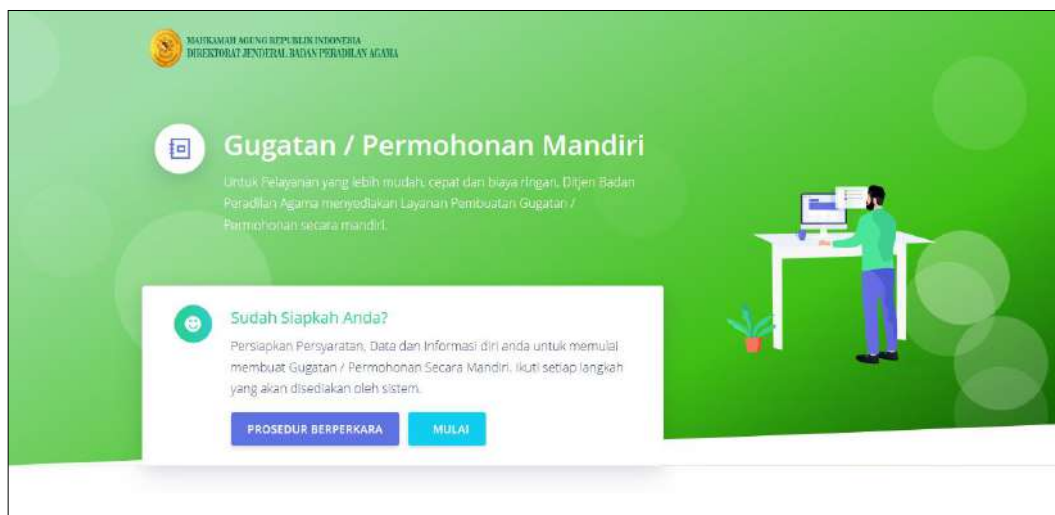
Gambar Tampilan Aplikasi Validasi Akta Cerai



11. Aplikasi Gugatan Mandiri

Menfasilitasi para pihak sebagai pengguna layanan peradilan dalam membuat gugatan/permohonan mandiri secara online.

Gambar Tampilan Aplikasi Gugatan Mandiri



12. Aplikasi Virtualisasi Surat Izin Online (Vision)

Aplikasi Vision (Virtualisasi Surat Izin Online) adalah aplikasi pelayanan perizinan, terdiri dari izin cuti, izin keluar negeri, izin tidak masuk kantor,

izin belajar, izin sidang hakim tunggal, izin pencantuman gelar dan izin penelitian. Hal ini sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 1027/DjA/HM.00/3/2020 tentang Pelayanan Perizinan Menggunakan Aplikasi Vision.

Izin Cuti ini diperuntukan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Izin Keluar Negeri ini diperuntukan bagi Tenaga Teknis Peradilan Agama sedangkan bagi Tenaga Non Teknis masih diajukan secara manual melalui Tingkat Banding untuk kemudian diajukan ke Badilag. Pada Tahun 2023 terdapat 1 (satu) orang Tenaga Teknis dan 1 (satu) orang Tenaga Non Teknis Pengadilan Agama Muara Enim yang mengajukan izin keluar negeri.

Izin Tidak Masuk Kantor ini diperuntukan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Izin Belajar ini diperuntukan bagi pegawai peradilan agama untuk mengajukan permohonan izin belajar pada jenjang pendidikan Strata-2 dan Strata-3. Pada Tahun 2023 belum ada Pegawai Pengadilan Agama Muara Enim yang mengajukan izin belajar jenjang S2 maupun S3.

Izin Sidang Hakim Tunggal ini diperuntukan bagi Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki Hakim paling banyak 3 (tiga) orang, demi kelancaran persidangan dapat mengajukan izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal melalui aplikasi ini untuk kemudian diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Muara Enim untuk saat ini sudah mengajukan izin sidang hakim tunggal.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 92/KMA/HK.05/5/2023 Jakarta, 3 Mei 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Persidangan
 Dengan Hakim Tunggal

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
di -
Muara Enim

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 1 Maret 2023 Nomor : W6-A5/515/HK.05/III/2023 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, dengan ini Mahkamah Agung menegaskan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk Majelis, yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim.

Saat ini di Pengadilan Agama Muara Enim hanya terdapat Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) orang Hakim, dengan jumlah perkara yang masuk hingga bulan April 2023 sebanyak 229 perkara. Untuk kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Muara Enim diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dengan catatan jika jumlah hakim telah terpenuhi untuk bersidang dengan susunan majelis, maka perkara yang ada harus disidangkan oleh Majelis Hakim.

Demikian, untuk dimaklumi.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**


MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang NonYudisial;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 92/KMA/HK.05/5/2023 Jakarta, 3 Mei 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Persidangan
Dengan Hakim Tunggal

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
di -
Muara Enim

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 1 Maret 2023 Nomor : W6-A5/515/HK.05/III/2023 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, dengan ini Mahkamah Agung menegaskan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk Majelis, yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim.

Saat ini di Pengadilan Agama Muara Enim hanya terdapat Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) orang Hakim, dengan jumlah perkara yang masuk hingga bulan April 2023 sebanyak 229 perkara. Untuk kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Muara Enim diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dengan catatan jika jumlah hakim telah terpenuhi untuk bersidang dengan susunan majelis, maka perkara yang ada harus disidangkan oleh Majelis Hakim.

Demikian, untuk dimaklumi.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**


MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang NonYudisial;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Izin Pencantuman Gelar ini diperuntukan bagi Tenaga Teknis Peradilan Agama. Pada Tahun 2023 belum ada Pegawai Pengadilan Agama Muara Enim yang mengajukan izin pencantuman gelar S2 maupun S3.

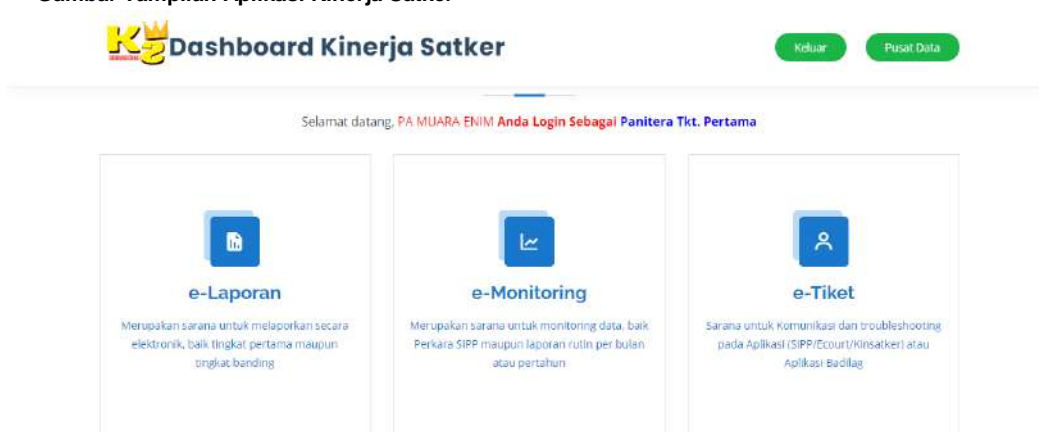
Gambar Tampilan Aplikasi Vision



13. Aplikasi Kinerja Satker

Aplikasi ini merupakan sarana untuk mengirim laporan secara terintegrasi antara Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Gambar Tampilan Aplikasi Kinerja Satker



14. Aplikasi CCTV Online

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, dalam rangka mewujudkan misi keempat dalam Cetak Biru Pembaharuan Badan

Peradilan 2010-2035, yakni meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan, telah melakukan pemasangan CCTV pada seluruh satuan kerja di bawahnya secara terpusat dan terkoneksi pada satu titik akses melalui Aplikasi Access CCTV Online (A.C.O) Ditjen Badilag pada laman website <https://cctv.badilag.net>.

Acces CCTV Online (ACO) merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan target capaian kinerja pada tataran implementasi :

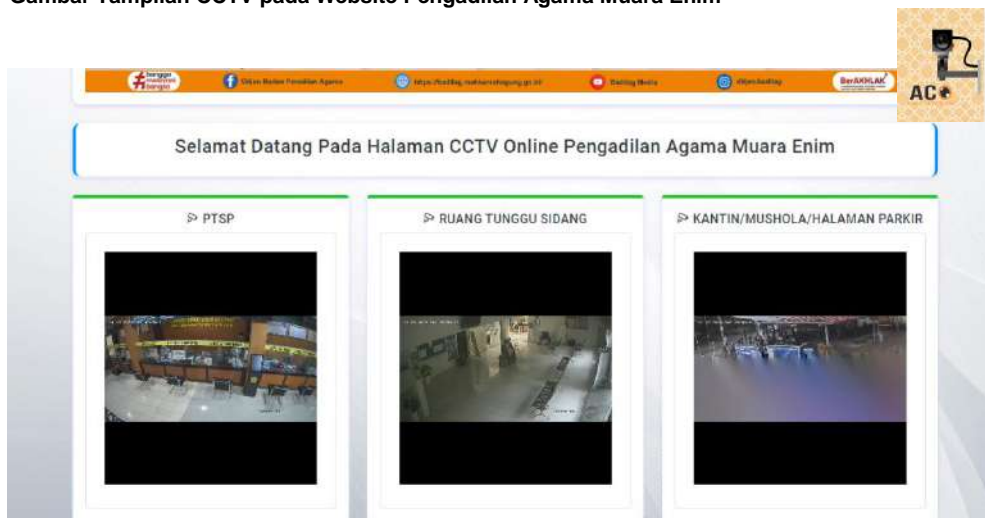
- Transparansi badan peradilan demi meningkatnya kepercayaan dan kenyamanan publik terhadap jenis layanan yang diberikan oleh peradilan agama.
- Pengawasan secara berjenjang terhadap kemungkinan terjadinya praktik-praktik suap, gratifikasi dan lain sejenisnya yang dapat menurunkan citra dan wibawa badan peradilan.
- Monitoring disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas pada jam kerja dan melaksanakan apel senin pagi dan jum'at sore setiap minggu.
- Evaluasi konsistensi dalam implementasi standar jaminan mutu, baik penerapan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) dalam melayani masyarakat maupun implementasi 5RIN (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin, Indah dan Nyaman) sesuai dengan standar jaminan mutu yang telah ditetapkan.

Dalam rangka transparansi serta memudahkan pencari keadilan dalam memantau pelayanan di Pengadilan, 3 (tiga) dari 9 (sembilan) mata CCTV pada setiap satuan kerja tingkat pertama yaitu ruang pelayanan (PTSP), ruang tunggu sidang serta halaman parkir dapat diakses melalui website masing-masing satuan kerja atau dapat menggunakan menu search pada laman website tersebut. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat pencari keadilan dapat mengetahui kondisi layanan di pengadilan sehingga dapat

menentukan kapan waktu yang tepat untuk datang ke pengadilan guna mendapatkan layanan.

Pada website Pengadilan Agama Muara Enim terdapat icon CCTV di pojok atas kanan yang dapat di klik/akses secara umum terhadap tiga titik tersebut.

Gambar Tampilan CCTV pada Website Pengadilan Agama Muara Enim



15. Pusat Data Perkara (Bank Data)

Aplikasi ini merupakan media informasi dengan menyajikan data-data perkara di peradilan agama dalam bentuk statistik maupun grafis. Tampilan data pada aplikasi ini bersumber pada aplikasi Kinerja Satker (Kinsatker) yang diisi oleh masing-masing satker. Aplikasi ini bertujuan memudahkan satker dalam melaporkan perkara secara elektronik, menyediakan kebutuhan data untuk berbagai kepentingan, pengambilan kebijakan dan/atau keputusan, perencanaan program jangka pendek dan jangka panjang, membuat data perkara dikumpulkan secara tertib, terkini, sistematis dan tervalidasi kebenarannya. Langkah ini merupakan upaya mewujudkan kemanunggalan data yang kemungkinan bias data, data ganda, human error dan kemungkinan kekeliruan lainnya dapat ditekan seminimal mungkin. Melalui aplikasi ini diharapkan ke depan akan

mengurangi beban satker pada Lingkungan Badan Peradilan Agama dalam melaporkan berbagai macam perkara tanpa harus mengirimkan laporan perkara secara fisik (paper less) sehingga akan lebih efisien dari segi waktu, anggaran, birokrasi serta lebih efektif mencapai kevalidan data.

Gambar Tampilan Dashboard Aplikasi Pusat Data Perkara



16. Aplikasi Biaya Mutasi

Aplikasi Biaya Mutasi ini merupakan bagian dari aplikasi Simtalak (Sistem Informasi Manajemen Ketatalaksanaan) yang diperuntukan untuk mengajukan biaya mutasi bagi Tenaga Teknis yang namanya masuk ke dalam Hasil Rapat TPM.

Gambar Tampilan Dashboard Simtalak bagi user Hakim



17. Aplikasi Call Center

Aplikasi Call Center merupakan sebuah inovasi yang lahir di tengah pandemi. Aplikasi ini diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H pada tanggal 28 Juli 2020. Aplikasi ini didirikan untuk melayani internal dan eksternal. Layanan internal terdiri dari layanan kesekretariatan, layanan tenaga teknis dan administrasi peradilan. Sedangkan untuk eksternal terdiri dari layanan informasi hukum, layanan konsultasi hukum dan layanan pengaduan.

Dikarenakan Pengadilan Agama Muara Enim adalah Pengadilan Tingkat Pertama maka hanya terdapat layanan untuk eksternal yang terdiri dari layanan meja informasi.

Gambar Tampilan Layanan Call Center

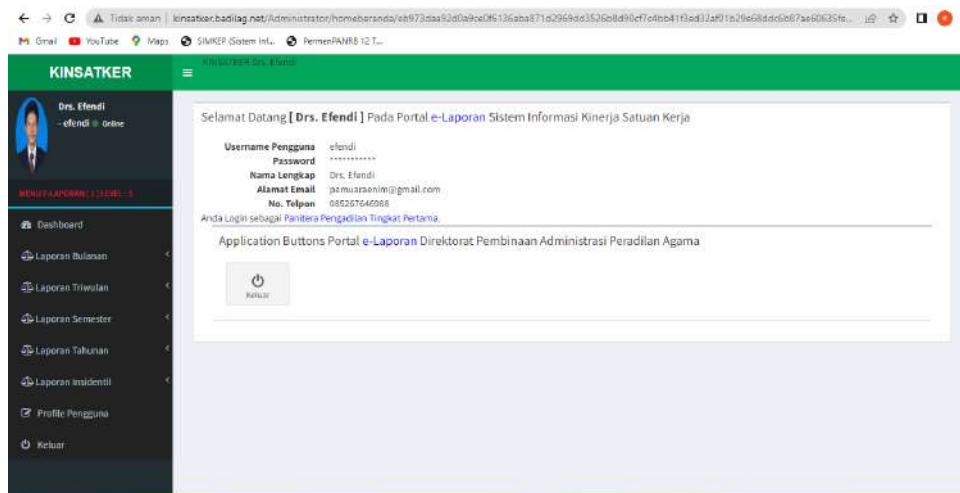


18. Aplikasi e-Laporan

Aplikasi e-Laporan ini merupakan bagian dari aplikasi Kinerja Satker (Kinsatker) sebagai sarana untuk melaporkan secara elektronik, baik tingkat pertama maupun tingkat banding yang diisi secara berkala. Pengadilan Agama Muara Enim telah menggunakan aplikasi ini sejak bulan Agustus 2021 sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan

Peradilan Agama Nomor 2256/DjA/HM.00/7/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Kepatuhan Pengiriman Data Laporan Bulanan dan Triwulan Melalui e-Laporan pada Aplikasi Kinsatker.

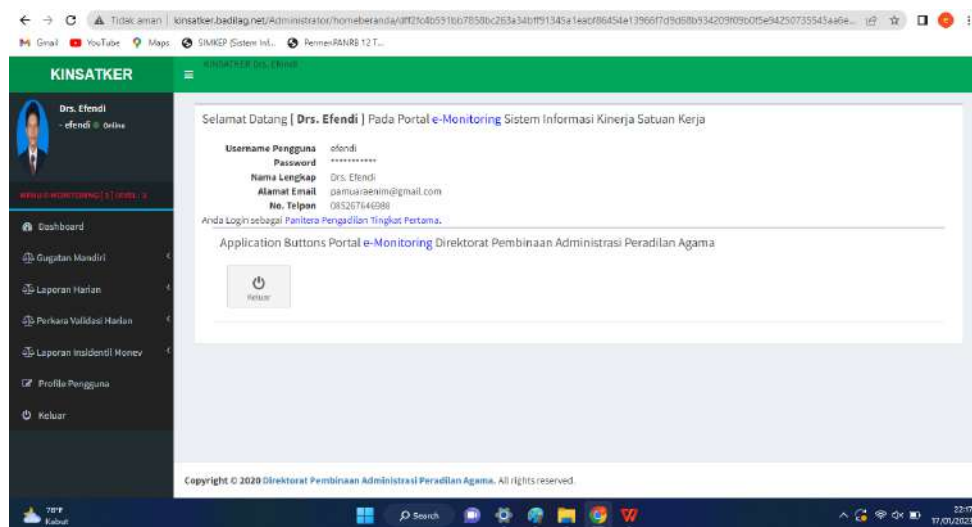
Gambar Tampilan Aplikasi e-Laporan pada Kinsatker



19. Aplikasi E-Monitoring

Aplikasi e-Monitoring ini merupakan bagian dari aplikasi Kinerja Satker (Kinsatker) sebagai sarana untuk monitoring data, baik perkara SIPP maupun laporan rutin per bulan atau per Tahun.

Gambar Tampilan Aplikasi e-Monitoring pada Kinsatker



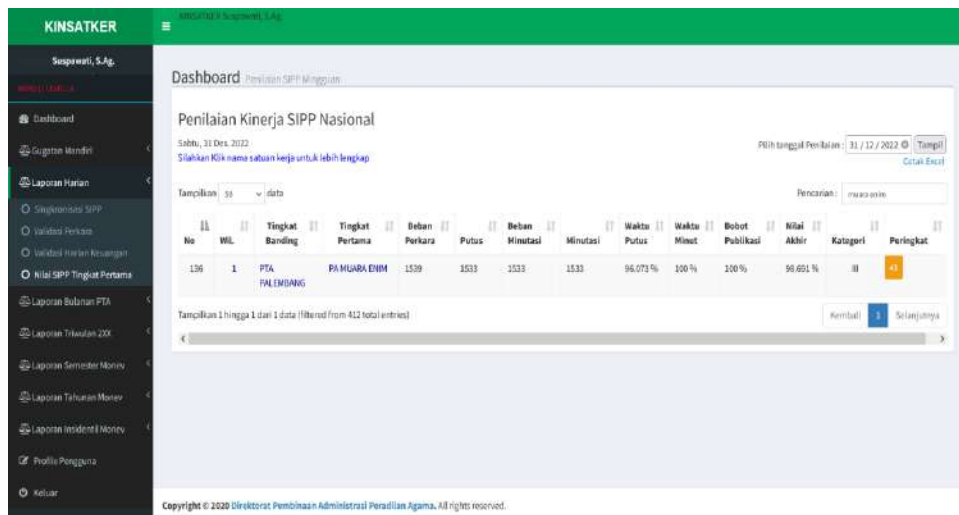
21. Penilaian SIPP Online

Penilaian SIPP Online ini merupakan bagian dari aplikasi Kinerja Satker (Kinsatker). Penilaian SIPP ini selain diumumkan pada laman website Badilag itu sendiri juga dapat kita lihat pada aplikasi Kinerja Satker (Kinsatker).

Gambar Tampilan Penilaian Kinerja SIPP pada Website Badilag



Gambar Tampilan Penilaian Kinerja SIPP pada Kinsatker



22. Penilaian Triwulan

Penilaian Triwulan ini merupakan bagian dari aplikasi Kinerja Satker (Kinsatker), dimana di aplikasi tersebut kita diwajibkan melakukan

pengisian laporan Triwulan yang kemudian akan dinilai oleh Badilag dan hasil penilaiannya diumumkan di website Badilag.

Gambar Pengumuman Penilaian Triwulan pada Website Badilag



23. Portal Ekonomi Syariah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi tonggak sejarah sekaligus landasan yuridis kompetensi absolut peradilan agama di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pasca lahirnya kewenangan baru tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI untuk mempersiapkan sumber daya manusia aparatur peradilan agama, menerbitkan regulasi terkait ekonomi syariah dan melakukan sosialisasi kepada semua unsur masyarakat agar tumbuh kepercayaan publik kepada peradilan agama, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di antara upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi aparatur peradilan agama menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI membuat portal khusus hukum ekonomi syariah ini, sebagai

referensi bagi para hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah serta rujukan bagi para akademisi dan masyarakat pemerhati peradilan lainnya terkait dengan hukum ekonomi syariah. Portal ini menyediakan berbagai informasi tentang beberapa putusan pengadilan agama terkait sengketa ekonomi syariah sejak tahun 2006 sampai sekarang, ragam peraturan perundang-undangan tentang hukum ekonomi syariah, yang meliputi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), serta beragam karya ilmiah dan media ajar terkait dengan hukum ekonomi syariah. Portal ini terhubung dengan berbagai link website lembaga lain yang memuat materi tentang hukum ekonomi syariah untuk memudahkan proses sosialisasi ekonomi syariah kepada semua unsur masyarakat agar akselerasi geliat dan peranan sistem ekonomi syariah di tengah-tengah pertumbuhan sistem ekonomi nasional semakin meningkat.

Gambar Pengumuman Penilaian Triwulan pada Website Badilag



24. Layanan Fit & Proper Test

Upaya keras mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi terus ditapaki Badan Peradilan Agama dengan menyelenggarakan Uji

Kepatutan dan Kelayakan/Fit & Proper test secara virtual, yang diperuntukkan bagi peserta calon Pimpinan PA kelas II dan calon Pimpinan PA Kelas IB. Pada 4 Mei 2020 lalu kegiatan profile assessment secara virtual untuk pertama kalinya diselenggarakan. Profile assessment merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ujian Kepatutan dan Kelayakan/Fit & Proper Test calon pimpinan Pengadilan Agama. Langkah maju Badilag ini sebenarnya tidak dipengaruhi oleh wabah pandemic Covid-19, hanya kebetulan waktunya bersesuaian. Sejak awal, Dirjen Badilag sudah mengambil terobosan dengan memutuskan untuk menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan/Fit & Proper test secara virtual. Hal ini ditandai dengan lelang pengadaan jasa assessor untuk profile sssessment diharuskan mampu menyelenggarakan ujian secara virtual.

25. Buku Tamu Digital

Melalui surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 070/DJA/OT.01.3/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal Penerapan Buku Tamu Elektronik meminta Pengadilan Tingkat Banding untuk mengembangkan buku tamu elektronik yang dapat digunakan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang dapat dimonitor secara online oleh Pimpinan.

26. SKIM

Survey Kepuasan Penerima layanan terhadap Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat penerima layanan tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, baik oleh masyarakat maupun instansi/unit terkait sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Penyusunan Survey Kepuasan Penerima layanan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terdapat 10 unsur/indikator.

Bab VI

Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar setiap tugas yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari sekian bentuk pengawasan, maka pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan itu sendiri.

Landasan hukum pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Muara Enim yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 001/SK/11/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/006/SK/III/1994, tanggal 31 Maret 1994, tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006, tanggal 19 Oktober 2006, tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Pengawasan.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 24 Agustus 2007, tentang Pemberlakuan Buku I.
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 29 Agustus 2007, tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.

Dalam membantu pimpinan melakukan pengawasan bidang pada Kepaniteraan dan Kesekretariatan Tahun 2023, Ketua Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan dan menunjuk Koordinator Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 1522/KPA.W6-A5/PW1/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023. Dengan demikian adapun susunan hakim pengawas bidang pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Susunan Hakim Pengawas Bidang

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BIDANG TUGAS PENGAWASAN
1	2	3	4
1.	H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. NIP 19790502 200704 1 001	Wakil Ketua /Hakim Madya Pratama	Penanggungjawab/ Koordinator Pengawasan
2.	Hj.Sabariah, S.Ag., M.H. NIP. 19690306 199703 2 004	Hakim Madya Utama	Manajemen Peradilan : 1. Program kerja. 2. Pelaksanaan/pencapaian target. 3. Pengawasan dan pembinaan. 4. Kendala dan hambatan. 5. Faktor-faktor yang mendukung.

			6. Evaluasi kegiatan
3.	Yeni Kurniati, S.H.I. NIP. 19830325 200604 2 003	Hakim Madya Pratama	<p>Administrasi Peradilan terdiri dari :</p> <p>Administrasi Perkara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur penerimaan perkara. 2. Prosedur penerimaan permohonan Banding. 3. Prosedur penerimaan permohonan Kasasi. 4. Prosedur penerimaan permohonan Peninjauan Kembali. 5. Ketepatan pengiriman berkas perkara banding, Kasasi dan peninjauan kembali 6. Keuangan perkara dan biaya proses serta konsinyasi 7. Pemberkasan perkara dan kearsipan. 8. Pelaporan perkara dan keuangan perkara setiap bulannya dan Laporan penerimaan serta pengeluaran PNBP <p>Administrasi Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepegawaian. 2. Keuangan/DIPA 3. Inventaris/BMN 4. Perpustakaan, 5. Tertib persuratan dan perkantoran.
4.	Rezha Nur Adikara, S.H.I. NIP. 199202202017121003	Hakim Pratama Muda	<p>Pelayanan Publik dan Keuangan Pengadilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan manajemen 2. Mekanisme pengawasan 3. Kepemimpinan. 4. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 5. Pemeliharaan/perawatan inventaris. 6. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, Kebersihan dan kerapihan. 7. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara. 8. Proses pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya

A. Internal

Pengawasan internal oleh Pengadilan Agama Muara Enim dilakukan dengan 1 (satu) sistem pengawasan, yaitu pengawasan langsung ke objek dan telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Pengawasan internal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pengawasan Melekat (Waskat)

Pengawasan dari atasan langsung terhadap bawahannya, baik secara preventif maupun repressif, agar pelaksanaan tugas bawahan itu berjalan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan secara rutin setiap bulan dan secara berkala, di samping itu juga dilakukan dengan cara mengadakan rapat-rapat rutin/berkala, rapat pimpinan dan musyawarah setiap permasalahan yang timbul serta mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas pokok peradilan.

Hakim Pengawasan Bidang (Hawasbid)

Hakim Pengawasan Bidang melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala 1 x 1 bulan atau 12 kali dalam satu Tahun sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, dan setelah melakukan pengawasan setiap hakim pengawas bidang menyampaikan laporannya secara berkala 1 x 3 bulan kepada Ketua melalui Wakil Ketua (Koordinator Pengawasan) untuk ditindak lanjuti. Ketua Pengadilan membuat laporan tidak lanjut atas penemuan penemuan dari hakim pengawas bidang tersebut setelah hal tersebut di tindaklanjuti.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan meliputi bidang :

1. Bidang Manajemen Peradilan
 - Pembinaan sumber daya manusia.
 - Tertib perkantoran dan rumah tangga.
 - Program kerja dan *job descriptions* pegawai.

- Ketertiban tata kelola persuratan dan pengarsipannya.
 - Penatausahaan dan pengelolaan perpustakaan.
2. Bidang Administrasi Perkara
- Ketepatan waktu minutasasi.
 - Ketepatan waktu pelapor perkara.
 - Ketertiban pembuatan laporan perkara sesuai pola BINDALMIN.
 - Ketertiban penyimpanan arsip pada para perkara.
 - Ketertiban penyimpanan berkas minutasasi dan arsip pelaporan perkara.
 - Ketertiban penata usahaan arsip perkara.
 - Penulisan data perkara ke dalam buku register perkara.
 - Penulisan data mediasi ke dalam buku register mediasi.
 - Ketertiban penyimpanan dokumen register perkara.
 - Ketertiban penulisan ke dalam semua buku register perkara.
3. Bidang Administrasi Umum
- Tingkat kesejahteraan pegawai seperti kenaikan pangkat, KGB, dan hak-hak pegawai lainnya.
 - Tingkatkan kedisiplinan pegawai / absensi.
 - Penghargaan dan hukuman pegawai.
 - Ketertiban dalam administrasi Barang Milik Negara (BMN) dan pemeliharannya.
 - Kebersihan dan keasrian kantor dan lingkungannya.
 - Ketertiban pengelolaan parkir.
 - Ketertiban pembukuan keuangan DIPA.
 - Realisasi keuangan DIPA.
 - Laporan keuangan DIPA.
 - Laporan Pajak Tahunan untuk semua pegawai.
4. Bidang Pelayanan Publik
- Penataan meja informasi dan petugas-petugasnya.

- Kecepatan dan ketepatan pelayanan baik dalam permintaan informasi perkara, program kerja, fatwa, dan lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pengadilan.
- Penanganan dan tindak lanjut pelaporan dari masyarakat.
- Ketertiban pembukuan keuangan perkara dalam register induk keuangan perkara, buku jurnal, dan buku bendahara.
- Laporan keuangan perkara setiap bulannya dan laporan penerimaan serta pengeluaran PNBPN.
- Ketertiban pembukuan biaya proses.
- Realisasi keuangan biaya prodeo dan posbakum.

Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah PTA Palembang

Selama Tahun 2023, Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah turun sebanyak satu kali melakukan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Muara Enim.

Pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah PTA Palembang yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 14 Juli 2023 yang diketuai Oleh YM. Drs. H. Nuheri, S.H., M.H. juga didampingi oleh Abdul Wahid, S.H., M.Hum (Panitera) dan Imron Rusadi, S.H (Kabag Perencanaan dan Kepegawaian) berdasarkan surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor W6-A/1498/PS.01/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023.

B. Evaluasi

Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Muara Enim telah melaksanakan pengawasan regular terhadap pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Muara Enim, dan evaluasi hasil pengawasan dan

pembinaan yang dilakukan di Pengadilan Agama Muara Enim baik dibidang kesekretariatan maupun dibidang kepaniteraan, yaitu :

1. Evaluasi dibidang Kepaniteraan khususnya pengawasan dan pembinaan dibidang administrasi perkara guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Enim. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan terhadap pengguna jasa layanan peradilan.
2. Evaluasi dibidang Kesekretariatan khususnya pengawasan dan pembinaan pada bagian umum dan keuangan, kepegawaian organisasi dan tata laksana, perencanaan teknologi informasi dan pelaporan.
3. Mengacu pada Buku IV Mahkamah Agung tentang tata laksana pengawasan peradilan yang meliputi pengawasan dan pembinaan secara rutin dan reguler, pemeriksaan keuangan dan penanganan pengaduan.

Semua hasil dari pengawasan yang dilakukan baik oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Muara Enim maupun Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda) Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah ditindak lanjuti secara keseluruhan disegala bidang objek pemeriksaan oleh unsur pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.

Bab VII

Penutup

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara yang ditangani Tahun 2023 mencapai **99,33%** yakni putus sebanyak 1.493 perkara, dimana jumlah perkara yang ditangani tersebut merupakan sisa perkara Tahun 2022 sebanyak 6 perkara dan perkara diterima Tahun 2023 sebanyak 1497 perkara dengan total 1503 perkara masuk. Dari jumlah tersebut perkara yang di cabut sebanyak 101 perkara dan sisa perkara Pengadilan Agama Muara Enim sebanyak 10 perkara dengan persentase sebesar 0,67%.
2. Pelaksanaan mediasi belum begitu optimal di Pengadilan Agama Muara Enim, sehingga dari 174 perkara yang dimediasi hanya sebanyak 40 perkara yang berhasil mediasi dengan perdamaian, sedangkan sisanya sebanyak 21 perkara berhasil sebagian dan 87 perkara tidak berhasil.
3. Anggaran DIPA (01) sebesar Rp 5.251.582.000 (Lima miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 5.237.613.612 (Lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus dua belas ribu rupiah), jumlah tersebut mencapai **99,7%** dengan sisa anggaran sebesar Rp 13.968.388 (Tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), yakni 0,3%.
4. Anggaran DIPA (04) sebesar Rp 142.320.000 (Seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 142.068.000 (Seratus empat puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah), jumlah tersebut mencapai **99,8%** dengan sisa anggaran sebesar Rp 252.000 (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yakni 0,2%.

5. Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan bagi pejabat Eselon IV belum terlaksana secara merata dimana pada Tahun 2023 masih terdapat 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
6. Diklat Tenaga Teknis Peradilan belum merata pada Tahun 2023, Diklat Teknis tersebut sangatlah dibutuhkan sekali oleh SDM Tenaga Teknis untuk meningkatkan kompetensinya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis yustisial.
7. Sarana dan prasarana fasilitas perkantoran belum begitu memadai, seperti AC, Printer, TV Media dan Meubelair, dimana kondisinya sebagian besar sudah rusak ringan sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar.

B. Rekomendasi

1. Untuk lebih efektifnya pelaksanaan mediasi perlu adanya pelatihan mediator bagi para hakim secara merata.
2. Untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan perlu secara terus menerus dilaksanakan pelatihan dan peningkatan ketrampilan, untuk itu perlu dilakukan pengusulan diklat terhadap SDM Teknis dan Non Teknis sehingga hak pegawai untuk mendapatkan pelatihan sebanyak 20JP per tahunnya terpenuhi.
3. Untuk peningkatan sarana dan prasarana apartur Pengadilan Agama Muara Enim perlu dilakukan perencanaan dan usul yang matang terhadap penyusunan anggaran belanja satuan kerja Pengadilan Agama Muara Enim (RKA-KL).